

SKRIPSI

IMPLEMENTASI *MILAN URBAN FOOD POLICY PACT* (MUFPP) DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PANGAN BERKELANJUTAN DI KOTA BANDUNG



SULASTRI PRATIWI

1810521034

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS
EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS FAJAR

MAKASSAR

2022

SKRIPSI

IMPLEMENTASI *MILAN URBAN FOOD POLICY PACT* (MUFPP) DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PANGAN BERKELANJUTAN DI KOTA BANDUNG



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

SULASTRI PRATIWI
1810521034

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

IMPLEMENTASI *MILAN URBAN FOOD POLICY PACT* (MUFPP) DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PANGAN BERKELANJUTAN DI KOTA BANDUNG

Disusun dan diajukan oleh

SULASTRI PRATIWI

1810521034

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Makassar, 19 September 2022

Pembimbing,



Dede Rohman, S.IP., M.Si.

NIDN: 0919057501

**Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial**

Universitas Fajar



Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.

NIDN: 0931108002

SKRIPSI

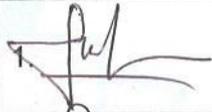
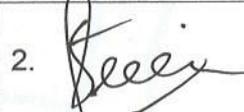
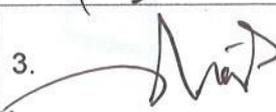
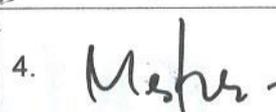
IMPLEMENTASI MILAN URBAN FOOD POLICY PACT (MUFPP) DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PANGAN BERKELANJUTAN DI KOTA BANDUNG

disusun dan diajukan oleh

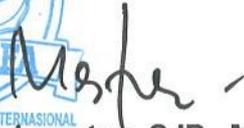
SULASTRI PRATIWI
1810521034

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **19 September 2022** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji,

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dede Rohman, S.IP., M.Si. NIDN: 0919057501	Ketua	
2.	Dr. Syamsul Asri, S.IP., M.Fil.I. NIDN: 0926028502	Sekretaris	2. 
3.	Achmad, S.IP., M.Si. NIDN: 0919047402	Anggota	3. 
4.	Andi Meganingratna, S.IP., M.Si. NIDN: 0931108002	Anggota	4. 

Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar



Andi Meganingratna, S.IP., M.Si.
NIDN: 0931108002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sulastris Pratiwi

NIM : 1810521034

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI MILAN URBAN FOOD POLICY PACT (MUFPP) DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PANGAN BERKELANJUTAN DI KOTA BANDUNG”** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pas 70).

Makassar, 19 September 2022

Yang membuat pernyataan


Sulastris Pratiwi

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hubungan Internasional (S.H.Int) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penelitian dan juga hingga selesainya skripsi ini. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan bimbingannya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini.
2. Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Fajar Makassar dan Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial.
3. Andi Meganingratna, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Fajar, penasihat akademik dan pembimbing KKPL Dede Rohman, S.IP., M.Si. penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala waktu yang diluangkan untuk penulis pada saat meminta saran dan masukan dalam penyusunan laporan KKLP.
4. Kantor Kerjasama Kota Bandung dan pihak *Milan Urban Food Policy Pact* yang telah memberikan data yang diperlukan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Terima kasih banyak kepada kedua orang tua yang telah mendukung studi saya hingga saat ini.
6. Terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, teman dekat para segenap Wanita Karir, Nalda, Kety, Cici, Sulpi, Deputa, the boys botak, rk, so adi, dan my partner life Dundun, teman - teman kos di bandung Wulan, Raisa, Dinan dan El.
7. Terima kasih juga kepada teman-teman huru hara yang selalu memberikan dukungan, Jamrin, Andry, Sinta dan Tono yang jauh di ibu kota.

8. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (HIMAHI) yang telah menjadi wadah tempat, pembelajaran dan rumah bagi saya <3.

Makassar, 19 September 2022

Sulastri Pratiwi

ABSTRAK

IMPLEMENTASI *MILAN URBAN FOOD POLICY PACT* (MUFPP) DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PANGAN BERKELANJUTAN DI KOTA BANDUNG

Sulastri Pratiwi
Dede Rohman

Kota Bandung mengalami peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada aspek pangan, yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan, selain itu juga jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya sangat tinggi. Kekhawatiran terhadap pasokan pangan di masa yang akan datang menjadi permasalahan yang tidak dapat dihindari terutama pada daerah urban. Maka Kota Bandung kemudian bergabung dalam sebuah perjanjian Internasional yaitu *Milan Urban Food Policy Pact* (MUFPP) yang diharapkan dapat memberikan metode dan strategi pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan sehingga Kota Bandung dapat lebih mandiri pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dan kerangka kerja MUFPP di Kota Bandung setelah bergabung dan apakah ada perkembangan yang pesat dan dapat meningkatkan produktivitas pangan di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan teori Rezim Internasional, konsep paradiplomasi dan konsep urbanisasi. Dengan menggunakan metode kualitatif dan dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil yang ditemukan adalah implementasi kebijakan dan kerangka kerja MUFPP yang dilakukan di Kota Bandung sendiri dalam langkah pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan di Kota Bandung berjalan sesuai dengan tujuan awal Kota Bandung untuk bergabung yaitu pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan. Terbukti pada 3 kategori kebijakan dan 12 poin kerangka kerja atau rekomendasi aksi yang telah di implementasi oleh Kota Bandung

Kata Kunci: Sistem Pangan, Rezim Internasional, Paradiplomasi, Urbanisasi, MUFPP, Kota Bandung

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE MILAN URBAN FOOD POLICY PACT (MUFPP) IN THE DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE FOOD SYSTEMS IN BANDUNG CITY

Sulastri Pratiwi

Dede Rohman

The city of Bandung has experienced an increase in population which has an impact on the food aspect, which causes land conversion, besides that the amount of waste produced every day is very high. Concern about food supply in the future is an unavoidable problem, especially in urban areas. The City of Bandung then joined an international agreement, namely the Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) which is expected to provide methods and strategies for developing a sustainable food system so that the city of Bandung can be more self-sufficient in food. This study aims to explain or find out how the implementation of MUFPP policies and frameworks in Bandung City after joining and whether there is rapid development and can increase food productivity in Bandung City. This research uses International Regime theory, the concept of paradiplomacy and the concept of urbanization. By using qualitative methods and data collection techniques, literature studies and in-depth interviews. The results found are the implementation of the MUFPP policy and framework carried out in the City of Bandung itself in the steps of developing a sustainable food system in the City of Bandung running in accordance with the initial goal of the City of Bandung to join, namely the development of a sustainable food system. It is proven in 3 policy categories and 12 points of framework or action recommendations that have been implemented by the City of Bandung

Keywords: Food System, International Regime, Paradiplomacy, Urbanization, MUFPP, Bandung City

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian Dan Rumusan Masalah	7
1.2.1 Fokus Penelitian.....	7
1.2.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis	8
1.4.2 Kegunaan Praktisi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Konseptual Dan Teori.....	11
2.1.1 Rezim Internasional.....	11
2.1.2 Paradiplomasi.....	18
2.1.3 Konsep Urbanisasi	25

BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Rancangan Penelitian	31
3.2 Kehadiran Peneliti.....	32
3.3 Lokasi Penelitian.....	33
3.4 Sumber Data.....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Teknik Analisa Data.....	35
3.7 Tahap-Tahap Penelitian	35
BAB IV HASIL PENALITIAN	37
4.1 Kebijakan Dan Kerangka Kerja MUFPP Dalam Pengembangan Sistem Pangan	37
4.2 Implementasi Pengembangan Sistem Pangan Berkelanjutan Di Kota Bandung Berdasarkan Kebijakan Dan Kerangka Kerja MUFPP	41
BAB V PENUTUP	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Buruan SAE di RW 4 Kel. Cipaganti Kec. Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat	49
Gambar 4.2 Kegiatan Kang Pisman di Babakan Sari, Kecamatan Kiaracondong	53
Gambar 4.3 Dokumentasi kegiatan Kampanye <i>food racing</i>	56
Gambar 4.4 Website resmi Badami <i>food sharing</i>	58
Gambar 4.5 Tampilan fitur Arimbi.....	60
Gambar 4.6 Acara forum regional di Kota Bandung	65

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Peningkatan Jumlah Titik Lokasi Buruan SAE di Kota Bandung....	48
Tabel 4.2 Video praktik pengembangan sistem pangan di Kota Bandung.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumberdaya hayati yang berasal dari produk pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, perairan, baik itu yang diolah maupun yang tidak diolah yang menjadi asupan makan dan minuman yang dikonsumsi manusia. Maka dari itu pangan menjadi salah satu hal utama yang tidak dapat dipisahkan oleh manusia dikarenakan pangan yang berfungsi untuk memberikan energi bagi manusia dalam beraktivitas.

Isu pangan global mulai mendapat perhatian pada tahun 1950-an sampai 1960-an, ketahanan pangan lebih ditekankan kepada ketersediaan pangan, baik pada tingkat nasional maupun global. Pada tahun 1970 isu ketahanan pangan semakin memprihatinkan ketika krisis pangan yang melanda Afrika terjadi karena gagal panen yang disebabkan oleh kekeringan, kemudian juga dikarenakan pertumbuhan penduduk yang begitu cepat dan produktivitas lahan yang terbatas, pertumbuhan output pertanian tahunan per kapita pada tahun 1960-an hanya sebesar 0,2% dan merosot tajam pada tahun 1970-an menjadi -1,4%.¹

Kekhawatiran akan ketahanan pangan di masa depan merupakan kekhawatiran yang tak terhindarkan, terutama di daerah perkotaan. Pada tanggal 25 September 2015, para pemimpin dunia secara resmi mengadopsi agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),

¹ L. Yollanda, 'WTO Menghegemoni Kebijakan Ketahanan Pangan Di Indonesiamelalui Agreement on Agriculture', *Satu, Buku Kelembagaan, Dasawarsa Pangan, Ketahanan Indonesia, Kementerian Pertanian*, 2016, 1.

yang mencakup 17 tujuan dan 169 tujuan yang mewakili aksi global untuk periode 2015-2030 yang mengarah pada tujuan untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.² Lingkungan perkotaan adalah salah satu tempat yang memiliki banyak permasalahan yang timbul bersamaan dengan industrialisasi dan modernisasi yang semakin pesat, maka dari itu dengan mewujudkan tujuan-tujuan yang ada dalam poin SDGs dibutuhkan suatu pembangunan yang inklusif, efektif dan efisien yang dapat memperhatikan setiap aspek.

Menurut UU 18 tahun 2012 tentang pangan mengatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.³ Ancaman terhadap ketersediaan pangan suatu negara bisa sangat serius, dengan penduduk negara tersebut berisiko kelaparan jika terjadi krisis pangan. Kelaparan, pada hakikatnya, bukan hanya fenomena alam masyarakat itu sendiri, tetapi tentu akan mempengaruhi kebutuhan dasar manusia melalui distribusi dan kekurangan makanan dan akan berdampak pada munculnya kekerasan yang akan muncul di mana-mana. Oleh karena itu, ancaman krisis pangan dapat mempengaruhi hak hidup masyarakat. Oleh karena itu, ancaman konflik internal akan sulit dihindari dan dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

Seiring dengan perkembangan zaman permintaan terhadap pangan terus mengalami peningkatan, yang dimana hal ini memberikan

² 'Apa Itu SDGs' <<https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu>> [accessed 11 January 2022].

³UU 18 Tahun 2012 Tentang Pangan', *Jagloabang*, 2020 <<https://www.jagloabang.com/pustaka/uu-18-2012-pangan>> [accessed 11 June 2022].

kekhawatiran dalam pemenuhan pangan terutama di daerah urban. Proses urbanisasi yang terjadi di daerah perkotaan terjadi akibat perpindahan penduduk dari desa ke kota yang mana tujuan mereka adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Tren revolusi digital saat ini telah merubah pola hidup hingga peradaban masa depan umat manusia. Salah satu fenomena yang dapat kita lihat secara langsung adalah akselerasi proses urbanisasi di seluruh dunia dimana hal ini juga dibuktikan dengan studi yang dilakukan PBB tentang tren urbanisasi dunia pada tahun 2014 pertama kalinya dalam sejarah umat manusia lebih dari setengah populasi dunia (54%) hidup di daerah urban dan diperkirakan pada tahun 2050 akan mencapai (66%). Di Indonesia sendiri populasi urban telah mencapai (53,3%) di tahun 2015 dan diperkirakan akan meningkat menjadi (68%) di tahun 2035 berdasarkan penelitian *Citiasia Center of Smart Nation (CCSN)*.⁴

Digitalisasi telah memperluas arti dari urbanisasi itu sendiri, pola kehidupan yang berubah dari pola ekonomi pertanian menjadi ekonomi industri telah membawa dunia pada perkembangan perkotaan yang sangat pesat dimana banyak nya lapangan kerja yang terbuka di perkotaan seperti lahirnya pabrik-pabrik, perumahan, dan pusat perbelanjaan, hal ini kemudian menjadi alasan mengapa banyak orang yang berpindah ke kota. Masyarakat urban ini kemudian berubah menjadi sistem yang kompleks dimana aktor penyusunnya yaitu manusia, teknologi dan lingkungan yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat di daerah urban ini berakibat pada berkurangnya lahan pertanian yang memberikan kecemasan pada ketersediaan pangan di masa yang akan datang di daerah urban tersebut.

⁴Buku LII Masterplan BSC', *Bandung Smart City*, 2020 <<https://smartcity.bandung.go.id/ebook/130>> [accessed 18 October 2021].

Kota Bandung merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia yang mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya, pada tahun 2018 jumlah penduduk Kota Bandung mencapai angka 2.503.708 jiwa, selanjutnya pada tahun 2019 naik menjadi 2.507.888 jiwa dan mengalami kenaikan jumlah penduduk menjadi 2.510.103 jiwa di tahun 2020.⁵ Kekhawatiran terhadap ketersediaan pangan di masa yang akan datang menjadi salah satu permasalahan yang penting untuk diantisipasi. Faktor yang membuat terjadinya kekhawatiran terhadap ketahanan pangan di Kota Bandung adalah dikarenakan lahan pertanian yang semakin sempit akibat masifnya pembangunan di Kota Bandung, selain itu sebagian orang tidak dapat menghormati pangan yang ada, hal ini dapat dilihat dari sampah makanan yang dihasilkan Kota Bandung sekitar 1.600 ton setiap tahunnya.⁶

Kota Bandung sendiri sangat bergantung pada pangan yang didatangkan dari luar daerah. Namun, hal tersebut kontraproduktif mengingat Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan, dimana volume sampah di Kota Bandung rata-rata 1.477 ton per harinya. Dari jumlah sampah tersebut, sebagian besar merupakan sampah organik atau sisa makanan. Sampah organik 63% atau sekitar 930 ton.⁷

Dari fakta - fakta yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa berkurangnya lahan pertanian, meningkatnya jumlah penduduk dan tingginya jumlah penduduk yang masih hidup dalam garis kemiskinan,

⁵Badan Pusat Statistik Kota Bandung', 2020 <<https://bandungkota.bps.go.id/indicator/12/32/1/jumlah-penduduk.html>> [accessed 11 January 2022].

⁶ Agus Permana, *Wawancara Tidak Terstruktur Dengan Staf Evaluasi, Administrasi Dan Dokumentasi*, 2021.

⁷'Bandung Food Smart City' <<https://bandungfoodsmartcity.org/about-us-2/>> [accessed 11 January 2022].

menunjukkan bagaimana ketersediaan pangan menjadi permasalahan yang mungkin saja dimasa depan akan dihadapi oleh Kota Bandung, maka diperlukan suatu strategi dan pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Dalam mengantisipasi permasalahan pangan di daerah urban, maka para pemangku kepentingan menggunakan Pembangunan berbasis *Smart City* dibutuhkan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan menangani permasalahan kota yang kompleks, dimana *Smart City* selain memanfaatkan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) tapi juga bertujuan untuk membangun masyarakat yang inovatif dan kreatif yang nantinya dapat meningkatkan infrastruktur kota.⁸ Pembangunan berbasis *Smart City* sangat dinamis dan unik maka dari itu setiap kota memiliki konsep yang berbeda-beda tergantung pada permasalahan yang dihadapi oleh suatu kota. Beberapa kota yang telah menggunakan konsep pembangunan berbasis *Smart City* seperti London terkenal dengan *Smart Cities Research Center*-nya yang memproses dan menganalisis data lalu lintas, pemerintahan, bisnis dan konsumen untuk menciptakan kota yang lebih efisien dan inovatif, Paris yang termasuk dalam *Smart City* selalu mendapat Peringkat seperti inovasi urutan ke-3, kota hijau di Eropa urutan ke-10 dan tata kelola digital ke-11, dan New York, kota besar AS yang juga menggunakan pengembangan cerdas berbasis kota, yang dikenal dengan program analitik bisnis *Solution Center* di mana semua perusahaan New

⁸ Widyoseno Suyud, '5 Kota Dengan Konsep Smart City Terbaik Di Dunia', 2018 <<https://inixindojogja.co.id/5-kota-dengan-konsep-smart-city-terbaik-di-dunia/?amp>> [accessed 11 January 2022].

York dapat mengakses data yang disediakan untuk menentukan proses dan keputusan bisnis.⁹

Dalam upaya pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan di Kota Bandung maka Pemerintah Kota Bandung melalui Pembangunan berbasis *Smart City* membuat suatu Program yaitu *Bandung Food Smart City* yang diharap dapat menangani permasalahan tata kelola sampah makanan dan upaya untuk pembangan sistem pangan berkelanjutan dengan bertujuan untuk menjadikan Kota Bandung sebagai Kota cerdas pangan. Melalui kegiatan - kegiatan seperti edukasi dan kampanye mengenai sampah makanan Pemerintah Kota Bandung mencoba untuk membangun pola pikir masyarakat untuk memiliki kepedulian terhadap lingkungan. *Bandung Food Smart City* adalah suatu program yang diharapkan dapat menjadikan Kota Bandung sebagai kota cerdas pangan.¹⁰ Pemerintah Kota Bandung juga berkolaborasi dengan LSM seperti Ricolto Veco dan Lembaga Pendidikan yaitu Fakultas Ilmu Politik dan Sosial Universitas Parahyangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan Dinas Ketahanan pangan dalam beberapa kegiatan.

Selain itu dalam upaya pengembangan sistem ketahan pangan berkelanjutan maka Pemerintah Kota Bandung membangun hubungan luar negeri dengan kota-kota lain di luar negeri dengan bergabung dalam Perjanjian *Milan Urban Food Policy Pact* (MUFPP) yang merupakan Perjanjian Internasional dari kota - kota di seluruh dunia yang berkomitmen untuk mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan. MUFPP adalah

⁹ Widyoseno Suyud, '5 Kota Dengan Konsep Smart City Terbaik Di Dunia', 2018 <<https://inixindojogja.co.id/5-kota-dengan-konsep-smart-city-terbaik-di-dunia/?amp>> [accessed 11 January 2022].

¹⁰ Bandung Food Smart City' <<https://bandungfoodsmartcity.org/about-us-2/>> [accessed 11 January 2022].

sebuah perjanjian Internasional yang menyatukan kota-kota di berbagai negara yang ingin mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan, berbagi ide dan inovasi terbaru dalam pengembangan sistem pangan dan penanganan masalah pangan di daerah urban. Hal ini tentunya menjadi salah satu gerakan bersama yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pengembangan sistem pangan, penanganan permasalahan sampah makanan dan permasalahan ketahanan pangan dunia.

Penulis memilih Kota Bandung sebagai topik penelitian karena kepedulian yang ditunjukkan Pemerintah Kota Bandung dalam mencegah permasalahan pangan di masa yang akan datang, dimana permasalahan pangan menjadi salah satu isu yang perlu untuk diperhatikan dan diantisipasi baik itu dalam lingkup nasional maupun internasional. Program *Bandung Food Smart City* adalah salah satu bukti keseriusan Pemerintah Kota Bandung dalam penanganan permasalahan pangan, selain itu Kota Bandung juga bergabung dalam MUFPP sebagai bentuk partisipasi untuk mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan. Kota Bandung adalah Kota pertama di Asia Pasifik yang bergabung dalam MUFPP, karena Kolaborasi yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung dengan Ricolto Veco yaitu salah satu INGO dalam beberapa kegiatan kampanye memberikan koneksi kepada Pemerintah Kota Bandung untuk bergabung dalam MUFPP.

1.2 Fokus penelitian dan Rumusan Masalah

1.2.1 Fokus penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka fokus penelitian pada skripsi ini adalah melihat bagaimana pengembangan sistem pangan Kota Bandung setelah Bergabung dalam

MUFPP mulai dari bagaimana kerangka kerja dari MUFPP lalu masuk pada bagaimana implementasi pengembangan sistem pangan berkelanjutan di Kota Bandung berdasarkan kebijakan MUFPP.

1.2.2 Rumusan masalah

Merujuk pada judul penelitian ini yaitu, “Implementasi *Milan Urban Food Policy Pact* (MUFPP) Dalam Pengembangan Sistem Pangan Berkelanjutan Di Kota Bandung” maka penulis membuat suatu rumusan masalah yang akan peneliti bahas yaitu:

1. Bagaimana kebijakan dan kerangka kerja MUFPP dalam pengembangan sistem pangan?
2. Bagaimana Implementasi pengembangan sistem pangan berkelanjutan di Kota Bandung berdasarkan kebijakan dan kerangka kerja MUFPP?

1.3 Tujuan penelitian

Dari permasalahan yang telah diajukan, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan atau mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dan kerangka kerja MUFPP di Kota Bandung setelah bergabung dan apakah ada perkembangan yang pesat dan dapat meningkatkan produktivitas pangan di Kota Bandung sehingga kekhawatiran terhadap pasokan pangan di masa yang akan datang dapat teratasi.

1.4 Kegunaan penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran mengenai Teori Rezim Internasional, Paradiplomasi, dan konsep Urbanisasi. Selain itu penelitian ini diharapkan juga

mampu memberikan pemikiran dan menambah wawasan mengenai pengembangan sistem pangan berkelanjutan sehingga dapat memberikan informasi dan menjadi bahan kajian bagi para akademisi dan pelajar terutama yang berasal dari latar belakang Program Studi Ilmu Hubungan Internasional.

Pada skripsi ini peneliti menggunakan konsep dan teori pendekatan Rezim Internasional yang akan menjelaskan bagaimana suatu rezim dibentuk dan dapat memberikan *OutCome* dan *Impact* bagi para anggotanya. Sementara dari konsep Paradiplomasi, kegunaan dari teori ini akan menjelaskan bagaimana peran aktor daerah dalam melakukan kerjasama luar negeri dalam mencapai kepentingannya maupun menangani permasalahan dari daerah tersebut. Konsep Paradiplomasi yang digunakan penulis diharap mampu untuk menggambarkan bagaimana perilaku dari aktor *sub-state* dalam penanganan permasalahan kota melalui hubungan dengan aktor *sub-state* di luar negeri yang bergabung dalam suatu perjanjian internasional. Konsep Urbanisasi akan menjelaskan bagaimana permasalahan kemunculan terhadap kekhawatiran terhadap pasokan pangan di masa depan yang dihadapi oleh suatu kota besar.

1.4.2 Kegunaan Praktisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, pemahaman dan pengetahuan mengenai bagaimana suatu Rezim Internasional dalam memberikan manfaat bagi para anggotanya melalui nilai, norma dan aturan yang dimaksud untuk memberikan dampak pada para anggotanya. Selain itu penelitian ini juga diharap mampu memberikan informasi, mengenai bagaimana suatu aktor *sub-state* menangani permasalahan yang dihadapi dengan melakukan kerjasama luar negeri atau yang disebut dengan Paradiplomasi, melalui kerjasama antara *sub-state actor* adalah salah satu upaya dalam mencegah terjadinya permasalahan maupun penanganan permasalahan yang dihadapi oleh suatu

daerah yang diharapkan dapat menerapkan sistem penanganan yang berkelanjutan yang telah ada di daerah mitra untuk diterapkan di daerah yang sedang mengalami suatu permasalahan. Penulis juga menggunakan konsep Urbanisasi dimana konsep ini diharapkan juga mampu memberikan informasi, pemahaman dan pengetahuan mengenai bagaimana proses urbanisasi yang terjadi dapat berdampak pada bagaimana suatu daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan juga disisi lain membuat berkurangnya lahan pertanian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Konseptual dan Teori

Dalam menganalisis atau mengkaji suatu isu atau fenomena, secara khusus di bidang ilmu Hubungan Internasional, maka diperlukan konsep dan teori sebagai landasan untuk mengarahkan penulis dalam meneliti mengenai “Implementasi *Milan Urban Food Policy Pact* (MUFPP) Dalam Pengembangan Sistem Pangan Berkelanjutan Di Kota Bandung”. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan teori dan konsep pendekatan Paradiplomasi, Rezim Internasional, dan konsep urbanisasi untuk menjawab dan menggambarkan bagaimana hubungan antara aktor ini dapat terjadi, melihat bagaimana suatu rezim dapat memberikan manfaat bagi para anggotanya. Sementara konsep Urbanisasi penulis gunakan sebagai alat analisa dalam menjabarkan bagaimana peningkatan penduduk di suatu daerah dapat berakibat pada ketahanan pangan.

2.1.1 Rezim Internasional

Dalam hubungan internasional, rezim internasional didefinisikan sebagai suatu tatanan yang berisi seperangkat prinsip, nilai, norma, dan aturan yang memuat kepentingan para aktor dalam hubungan internasional. Stephen Krasner mendefinisikan rezim internasional sebagai seperangkat norma, aturan, dan proses pengambilan keputusan eksplisit dan implisit di mana semua harapan para aktor dalam hubungan internasional bertemu.¹¹

¹¹ M Martin, 'Rezim Internasional', *Academiedu.Com*, 2017.

Sementara itu, Haggard dan Simmons berpendapat bahwa kepentingan rezim berasal dari konsep dominan tentang pemerintahan, kekuasaan, dan organisasi internasional, definisi rezim yang berbeda dengan kerja sama, terutama dalam definisi institusi. Diet adalah contoh perilaku kooperatif dan upaya untuk mempromosikan kerja sama, tetapi kerja sama juga dapat terjadi tanpa diet sebelumnya. Kepentingan rezim berasal dari konsep dominan pemerintahan, otoritas dan organisasi internasional. Perbedaan mendasar antara rezim terletak pada pandangan kedua para aktor hubungan internasional, khususnya hubungan internasional.¹² Rezim mengacu pada pengaruh perilaku yang ditimbulkan dari organisasi internasional pada aktor-aktor yang lainnya, terutama aktor negara. Rezim berfokus pada ekspektasi aktor, berbeda dengan institusi yang lebih melihat kepada apa yang terjadi dalam organisasi dari pada melihat pengaruh yang ditimbulkan organisasi internasional terhadap aktor-aktor lainnya.

Berdasarkan teori efektivitas rezim Arild Underdal, ada tiga komponen sebagai variabel independen yaitu, *problem malignancy* (kompleksitas), *problem-solving* (kemampuan memecahkan masalah), dan *level of collaboration* (tingkat kerjasama). Berikut merupakan penjelasan dari ketiga komponen tersebut:¹³

1. *Problem Malignancy*, kompleksitas atau beratnya masalah, skema ini dianggap efektif berdasarkan beratnya masalah. Semakin kompleks masalahnya, semakin kurang efisien rezim, yang membuat kerjasama

¹² 'M Martin,'Rezim Internasional', *Academiedu.Com*, 2017

¹³ Luluk Erika, 'Efektivitas Rezim Kerjasama Sister City Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Pemerintah Kota Guangzhou', 2 (2019), 89.

menjadi sangat sulit. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama paksa yang ditandai dengan inkonsistensi, yaitu perbedaan pemahaman antara subjek rezim mengenai sudut pandang terhadap isu-isu yang menjadi kepentingan rezim. Jika *problem malignancy* yang dihadapi rezim bersifat politis dan intelektual, rezim dianggap tidak efektif. Pada *problem malignancy* terdapat dua indikator yaitu *asymmetry* dan *cumulative cleavages*. Pertama, *asymmetry* adalah perbedaan kepentingan nasional para aktor rezim. Kedua *cumulative cleavages* tersebut merupakan perbedaan antara pelaku aktor sehingga menimbulkan perpecahan.

2. *Problem Solving Capacity* (penyelesaian masalah) *Problem solving* adalah pemecahan masalah yang berkaitan dengan efektivitas rezim. Ada tiga indikator *problem solving*, yaitu *institutional setting*, *distribution of power, skill and energy*. *Institution setting* terkait dengan aturan rezim. Distribusi kekuasaan ketika ada distribusi kekuasaan yang adil dalam rezim, ketika partai dominan adalah pemimpin tetapi tidak cukup kuat untuk mengabaikan aturan dan ada pihak minoritas yang bertanggung jawab untuk mengendalikan partai dominan. Penguasaan dan kekuasaan sebagai peran instrumental seorang pemimpin dan komunitas epistemik. Peran komunitas epistemologis sangat penting dalam memberikan kepastian empiris dan ilmiah yang ingin dicapai. Komunitas epistemik dapat memperkuat basis intelektual di mana sebuah rezim dibentuk dan dioperasikan.

3. *Level of Collaboration* Pada level ini, dapat melihat level koordinasi melalui level skala. Ada enam skala ordinal untuk mengukur tingkat kerjasama suatu rezim, yaitu :
- a. Skala (0) yaitu para anggota rezim bergabung dalam kesepakatan tetapi tidak melaksanakan kesepakatan tersebut
 - b. Skala (1) yaitu para anggota rezim melakukan koordinasi tindakan dengan kesepakatan dalam bentuk tidak tertulis (*coordination of action on the basis of tacit understanding*).
 - c. Skala (2) yaitu para anggota rezim berkoordinasi bertindak berdasarkan aturan atau standar yang telah dirumuskan tetapi dalam pelaksanaannya sepenuhnya diserahkan kepada para anggota rezim dan tidak ada penilaian secara terpusat terhadap efektivitas berjalannya rezim tersebut.
 - d. Skala (3) yaitu sama dengan skala 2 namun bedanya ada penilaian efektivitas rezim secara terpusat.
 - e. Skala (4) yaitu para anggota rezim dalam perencanaan berkoordinasi dengan implementasi secara terpusat.
 - f. Skala (5) yaitu para anggota dalam rezim melakukan koordinasi melalui perencanaan dan pelaksanaan yang implementasinya terintegrasi disertai dengan penilaian efektivitas yang terpusat.

Output dari rezim didefinisikan sebagai seperangkat aturan, norma-norma, prinsip, keputusan yang muncul akibat dari proses pembentukan dalam rezim dapat berupa tertulis maupun tidak tertulis contohnya perjanjian, konvensi, rules of law. Outcome dari rezim merupakan hasil dari implementasi rezim yang berhubungan dengan perubahan perilaku

aktor yang terlibat dalam rezim. Impact dari rezim berkaitan dengan tingkat keberhasilan dalam mengatasi permasalahan dalam pembentukan rezim. Adanya perubahan pada perilaku aktor atau terciptanya situasi tertentu yang telah ditentukan atau diinginkan oleh rezim.

Penulis dalam penelitian ini memasukkan beberapa penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai bahan referensi dalam penulisan ini. Jurnal yang berjudul "Efektivitas Rezim Kerjasama *sister city* Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Pemeritah Kota Guangzhou" ditulis oleh Luluk Erika. Efektivitas pelaksanaan kerjasama antara pemerintah kota Surabaya dan pemerintah kota Guangzhou. Pemerintah Kota Surabaya telah membentuk *sister city* yang bertujuan untuk: Pertama, melawan gelombang globalisasi dan pasar bebas. Kedua, dapat mendukung upaya pembangunan perkotaan. Ketiga, dapat berkontribusi pada promosi kota di dunia internasional. Tujuan Pemerintah kota Guangzhou dalam *sister city* ini adalah untuk saling bertukar informasi dan bekerjasama dalam berbagai bidang, karena Pemkot Guangzhou meyakini bahwa Surabaya memiliki potensi yang besar. Kedua mitra memiliki pelabuhan besar dan sedang berkembang menjadi kota komersial dengan potensi ekonomi, sehingga kerjasama tersebut akan membawa banyak manfaat bagi masing-masing kota. Pemerintah Kota Surabaya berharap kerjasama ini dapat membantu meningkatkan perekonomian dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Surabaya. Namun, pelaksanaan kerjasama antara kota mitra Surabaya dan Guangzhou ini kurang efektif. Dilihat dari *level of collaboration* menunjukkan 2 poin yang berarti program tersebut kurang efektif. Kembar antara Pemerintah Kota Surabaya dan Kota Guangzhou diatur dengan nota kesepahaman yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Namun, tidak

ada standar implementasi untuk bidang kerja sama yang telah disepakati sebelumnya. Kedua, dilihat dari *problem solving*, menunjukkan bahwa rezim kurang efektif karena masalah incongruity, yaitu perbedaan pemahaman tentang integrasi pemerintah kota Surabaya dan pemerintah kota Surabaya. Dalam kemitraan kota Surabaya-Guangzhou, terdapat beberapa daerah yang belum mencapai tujuan awal dari kesepakatan tersebut. Ketiga, bila dievaluasi atas dasar *problem solving*, menunjukkan bahwa rezim tersebut kurang efektif karena adanya pergantian kepala pemerintahan kota, sehingga politik yang berlaku perlu adanya sinkronisasi kebijakan. Pemerintah kota sebelumnya telah menyikapi dengan menyampaikan pada pemangku kepentingan berikutnya agar kerjasama sister city ini tetap berjalan sesuai dengan tujuan awal.¹⁴

Dalam Penelitian yang berjudul “Analisis Pembentukan Rezim Internasional Terhadap *Eu-Turkey Refugee Agreement*” yang ditulis oleh Dewa Ayu Rachmitha Sekar Kinanti. Dalam tulisan tersebut membahas tentang bagaimana implementasi *EU-Turkey Refugee Agreement*. Eropa adalah harapan pengungsi yang melarikan diri, dan negara Turki adalah pintu gerbang ke Eropa, Eropa Barat atau Eropa Timur. Kedatangan pengungsi, khususnya warga Suriah, di kawasan Uni Eropa membuat Uni Eropa kesulitan mengontrol jumlah pengungsi yang datang. Seiring dengan masalah pengungsi ini. Pasalnya, Uni Eropa masih memiliki masalah ekonomi di beberapa negara anggota, termasuk Yunani yang mengalami masalah ekonomi terbesar sejak 2015. Kedua isu ini tentu menjadi perhatian Uni Eropa dalam beberapa hal, termasuk isu keamanan. Sehingga ini

¹⁴ Luluk Erika, ‘Efektivitas Rezim Kerjasama Sister City Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Pemerintah Kota Guangzhou’, 2 (2019), 89.

menjadi nilai interpretatif bagi Uni Eropa, mengingat jumlah pengungsi yang berhasil memenuhi wilayah Uni Eropa semakin meningkat dan bahkan Uni Eropa tidak dapat mengontrolnya secara sepihak, maka Uni Eropa harus membuat kesepakatan dengan turkey harden. Karena Turki juga merupakan negara yang menampung banyak pengungsi, terutama pengungsi dari Suriah. Di sisi lain, Turki memiliki pandangan dan kepentingannya sendiri. Keinginan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa sudah ada sejak lama. Seiring dengan keinginan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa, Turki juga mengalami jenis frustrasi yang sama seperti yang dirasakan Uni Eropa tentang penyaringan pengungsi. Maka dalam hal ini Turki membutuhkan kerjasama dengan pihak lain yaitu Uni Eropa. Hal ini juga menjadi persoalan interpretasi bagi Turki sebelum akhirnya diputuskan untuk melaksanakan *EU-Turkey Refugee Agreement*. Pada saat yang sama, Turki mengklaim sebagai negara teraman bagi pengungsi, yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa Turki ingin bergabung dengan *EU-Turkey Refugee Agreement*. Dalam tulisan tersebut didapati bahwa Uni Eropa dan Turki belum merealisasikan secara penuh 9 poin perjanjian dalam *EU-Turkey Refugee Agreement*. Masalah yang mereka hadapi adalah bagaimana memberi tempat tinggal, makanan dan fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan pengungsi yang secara ekonomi menjadi beban. Maka dapat disimpulkan bahwa rezim ini terbentuk atas dasar permasalahan yang sama yang ingin diselesaikan dan juga kedua pihak memiliki kepentingannya masing-masing.¹⁵

¹⁵ Dewa Ayu Rachmitha Sekarkinanti, 'Analisis Pembentukan Rezim Internasional Terhadap Eu-Turkey Refugee Agreement', 2020.

2.1.2 Paradiplomasi

Paradiplomasi adalah istilah yang menggambarkan fenomena baru keterlibatan sub-nasional dalam hubungan internasional. Paradiplomasi sering disebut sebagai keterlibatan entitas negara-bangsa (teritori) dalam urusan internasional. Beberapa sarjana melihat paradiplomasi dalam diplomasi dan mendefinisikannya sebagai aktivitas internasional langsung dari aktor sub-nasional yang mendukung, melengkapi, meningkatkan, mereplikasi, atau menantang diplomasi negara-bangsa. Menurut Takdir Ali Mukti, para-diplomasi mengacu pada perilaku entitas negara dalam kerangka kepentingan khusus mereka dan kemampuan mereka untuk menjaga hubungan luar negeri dengan pihak asing.¹⁶

Dalam studi ilmu hubungan internasional kerjasama yang awalnya hanya dilakukan antara *actor state*, seiring perkembangan zaman kemudian aktor lainnya seperti *sub-state actor* juga melakukan kerjasama luar negeri dengan daerah di luar negeri, INGO, NGO dan aktor lainnya. Aktivitas yang dilakukan oleh *sub-state actor* dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik.¹⁷ Seperti halnya ketika komoditas yang dimiliki oleh suatu daerah misalnya mitra 1 dan tidak dimiliki oleh daerah mitra ke-2 yang kemudian komoditas yang ada di mitra 1 di contoh dan diikuti oleh mitra ke-2 kerjasama dalam bentuk ini biasanya disebut dengan istilah *sister city* atau kota kembar. Fenomena aktivitas hubungan luar negeri yang dilakukan oleh *sub-state actor* ini disebut dengan istilah Paradiplomasi. Istilah paradiplomasi pertama kali diluncurkan dalam perdebatan akademik oleh

¹⁶ Takdir Mukti, *Paradiplomacy Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, 2013.

¹⁷ Mukti Takdir, *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia* (Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta, 2013).

ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah *parallel diplomacy* menjadi *paradiplomasi*, yang mengacu pada makna *the foreign policy of non-central governments*, menurut Aldecoa, Keating dan Boyer. Istilah lain yang pernah dilontarkan oleh Ivo Duchacek untuk konsep ini adalah *micro-diplomacy*¹⁸

Konsep *paradiplomasi* telah menjadi pendekatan yang sering digunakan untuk menjelaskan isu-isu hubungan internasional oleh aktor-aktor regional. Duchacek menjeaskan bahwa ada tiga jenis *paradiplomasi*, yaitu:¹⁹

1. *Transholder Paradiplomacy*, mengacu pada hubungan kelembagaan, formal atau informal antara pemerintah daerah di negara-negara tetangga yang berbeda tetapi secara geografis berdekatan.
2. *Transregional Paradiplomacy* yaitu hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah daerah di negara yang berbeda dan tidak memiliki perbatasan langsung, tetapi negara tempat kedua pemerintah tersebut berada berbatasan langsung dengan wilayah yang sama.
3. *Global Paradiplomacy* yaitu hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah regional dari negara yang berbeda, wilayah yang berbeda, belahan dunia yang berbeda.

Jurnal yang berjudul “*Paradiplomasi Melalui Kerjasama sister city: Upaya Untuk Meningkatkan Potensi Industri Pariwisata di Kabupaten Sumenep*” yang ditulis oleh Alia Rizka Mansyur. Dalam jurnal tersebut

¹⁸ Mukti Takdir, *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia* (Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta, 2013).

¹⁹ Mukti Takdir, *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia* (Yogyakarta : The Phinisi Press Yogyakarta, 2013).

membahas mengenai potensi industri pariwisata Sumenep. Sumenep merupakan salah satu kabupaten dari pulau Madura yang memiliki potensi sumberdaya pariwisata yang dominan terutama sumberdaya pesisir dan lautan. Sumenep memiliki sumberdaya perikanan laut, mangrove, terumbu karang, padang lamun, rumput laut, dan bahan-bahan bioaktif, minyak bumi, gas, mineral, pasir, dan bahan tambang lainnya) serta berbagai macam energi kelautan (gelombang, pasang surut, dan angin. Selain itu Sumenep juga memiliki kekayaan budaya yang ikonik yaitu keris. Berdasarkan catatan UNESCO, empu keris terbanyak di Indonesia berada di Sumenep dimana terdapat sekitar 652 empu yang terdata pada tahun 2018.²⁰

Kemajuan teknologi komunikasi telah mendorong globalisasi saling ketergantungan antar negara dan antar masalah semakin erat. Akibatnya tercipta suatu dunia tanpa batas (*borderless world*) yang seolah-olah telah membentuk suatu *global village* bagi masyarakat dunia, yang mengakibatkan perubahan-perubahan mendasar yang terjadi di lingkup nasional, regional maupun global, dan telah menuntut kebijakan dan perangkat baru dalam pelaksanaan hubungan antar negara.

Pemerintah Sumenep harus berpacu untuk meningkatkan potensi pariwisata yang ada dan wisata yang masih belum dijadikan objek pariwisata, salah satunya melalui paradiplomasi kerjasama *sister city* untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat dengan industri pariwisata yang potensial. Langkah ini dirasa sangat penting untuk

²⁰ Alia Rizka Mansyur, 'Paradiplomasi Melalui Kerjasama Sistercity: Upaya Untuk Meningkatkan Potensi Industri Pariwisata Di Kabupaten Sumenep', 16 (2021), 3.

diterapkan dengan memanfaatkan potensi yang ada, serta memajukan pariwisata di Kabupaten tersebut.

Di Indonesia legalitas untuk melakukan kerjasama luar negeri diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan daerah otonom untuk melakukan kerjasama luar negeri, terdapat dalam pasal 42 ayat (1), bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ditegaskan pula dalam penjelasan pasalnya bahwa selain *sister city/province*, Pemda juga dapat membuat perjanjian kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal dan kerja sama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.²¹

Namun perlu ditegaskan bahwa kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh *sub-state actor* bukan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, melihat pada UU No. 32 Tahun 2004, masuk dalam kategori kewenangan Tidak Wajib bagi Daerah. Pasal 13 dan 14 UU ini tidak menyebutkan kerja sama luar negeri sebagai urusan wajib bagi provinsi dan kabupaten/kota. Meskipun aktivitas ini tidak wajib, melihat pada situasi dan kondisi di era globalisasi ini menjadi suatu hal yang perlu untuk dilakukan untuk mengejar ketertinggalan dan menghindari timbulnya sifat kepasifan suatu daerah. Daerah yang tidak memanfaatkan peluang dalam pergaulan internasional akan sangat mengalami keterlambatan kemajuan. Maka dari itu penting bagi suatu daerah memanfaatkan peluang kerjasama yang ada

²¹ Mukti Takdir, *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia* (Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta, 2013).

dalam menghadapi kemajuan globalisasi yang ada serta menangani permasalahan daerah yang ada.

Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Paradiplomasi Pemerintahan Kota Medan Dalam Kerjasama *Sister City* Kota Dengan Kota Gwangju Dan Ichikawa” yang ditulis oleh Yasir Pautan Daulay. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana pelaksanaan paradiplomasi pemerintahan kota medan dengan kota gwangju dan Ichikawa, kerjasama yang dilakukan berbentuk kerjasama *sister city*. Salah satu kota kemitraan kerjasama *sister city* Kota Medan yang saat ini telah menandatangani MoU dan intens melakukan kerjasama adalah Kota Gwangju dan Ichikawa yang telah terlaksana hingga 20 tahun lebih. Dalam pelaksanaan kerjasama *sister city* dengan Kota Gwangju dan Ichikawa Pemerintah Kota Medan berfokus pada empat bidang yakni Pendidikan dan Pelatihan, Ekonomi Investasi, Kepemudaan, dan Kebudayaan.²²

Pemerintah Kota Medan akan terus memperluas kerjasama di bidang-bidang ini, bekerja untuk kepentingan masing-masing kota, dan berharap untuk pengembangan kota dan masyarakatnya lebih lanjut. Pertukaran pelajar, pelatihan, investor dan pengiriman tim kesenian merupakan hasil dari implementasi Paradiplomasi di kota Medan.

Meskipun dalam pelaksanaan kerjasama terdapat berapa hambatan seperti, Kegiatan yang bersifat *High Cost* (Biaya Tinggi) dan terbatasnya anggaran, Kebijakan dan Budaya Pemerintahan Daerah Terkait, Komunikasi dan Kesiapan Pemerintah Kota dan Keterlibatan *Stakeholders*.

²² Yusri Pautan daulay, ‘Pelaksanaan Paradiplomasi Pemerintahan Kota Medan Dalam Kerjasama *Sister City* Kota Dengan Kota Gwangju Dan Ichikawa’, 2019.

Terlepas dari hambatan tersebut pemerintah daerah dapat lebih melakukan pengembangan, menginovasi potensi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Jurnal yang berjudul “*Menuju Surabaya Green City Melalui Kerjasama Kota Kembar Surabaya-Kitakyushu*” yang ditulis oleh Fany Widiana dan Ario Bimo Utomo. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai kerjasama yang dilaksanakan oleh Kota Surabaya dan Kota Kitakyushu, kedua kota telah aktif melakukan kerjasama pada bidang lingkungan dari tahun 1997 saat penandatanganan *Joint Declaration of The Kitakyushu Conference on Environmental Cooperation among Cities in The Asian Region*. Kemudian kedua kota memutuskan untuk melakukan kerjasama ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih spesifik yaitu kerjasama paradiplomasi “*Green Sister City of Surabaya-Kitakyushu* yang diresmikan dengan penandatanganan MoU oleh kedua di Surabaya pada tahun 2012.²³

Hal yang melatarbelakangi kerjasama ini adalah masalah lingkungan yang dialami Kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan salah satu daerah urban yang memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi, Surabaya berada dalam urutan kedua setelah DKI Jakarta. Permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh kota Surabaya salah satunya adalah permasalahan sampah, kurangnya lahan hijau, dan melihat pada sejarahnya Kota Surabaya pada tahun 2000 mengalami banjir sampah akibat kurangnya Lahan Pembuangan Akhir (LPA).

²³ Fany Widiana and Ario Bimo Utomo, ‘Menuju Surabaya Green City Melalui Kerjasama Kota Kembar Surabaya-Kitakyushu’, 8.1 (2021).

Pemerintah setempat menyadari keterbatasan kemampuan dan teknologi dalam menangani permasalahan tersebut. Kitakyushu memiliki kesamaan kondisi yaitu sama-sama kota industri yang mengalami permasalahan sampah yang serupa. Pada tahun 1960, Kota Kitakyushu mengalami kondisi lingkungan asap dan limbah industri menjadi pemandangan yang lazim pada saat itu, membuat langit terlihat abu-abu dan air sungai menjadi kotor. Dengan permasalahan yang ada maka timbul kesadaran masyarakat dan dukungan dari pemerintah setempat, maka Kota Kitakyushu telah berhasil melakukan pembangunan ramah lingkungan menggunakan *green technology*. Penanganan yang dilakukan Kota Kitakyushu disebut sebagai *smart city*, dimana sektor industri yang terus berkembang pesat namun tetap ramah lingkungan bagi penduduknya.²⁴

Dalam setiap kerjasama, masing-masing aktor memiliki kepentingannya masing-masing, Surabaya memiliki kepentingan untuk mempelajari cara Kitakyushu dalam mengolah sampah, sedangkan kepentingan Kitakyushu dalam kerjasama *sister city* ini adalah menjadi pusat Asia untuk masyarakat rendah karbon. Dengan terlibat dalam kerjasama *city to city*, Kitakyushu akan mengembangkan interaksi yang berfokus pada hubungan antar kota, hal tersebut akan membantu Jepang mendapatkan rasa hormat dari masyarakat internasional untuk berkontribusi pada penciptaan kota hijau di Asia.

²⁴ Fany Widiana and Ari Bimo Utomo, 'Menuju Surabaya Green City Melalui Kerjasama Kota Kembar Surabaya-Kitakyushu', 8.1 (2021)

2.1.3 Konsep Urbanisasi

Urbanisasi adalah perpindahan penduduk yang asalnya dari daerah pedesaan menuju ke wilayah perkotaan atau kota besar dengan tujuan menetap dalam kurun waktu tertentu. Adapun pengertian urbanisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah perpindahan penduduk secara berduyun-duyun dari desa (kota kecil, daerah) ke kota besar (pusat pemerintahan).²⁵ Sementara pengertian urbanisasi menurut para ahli, menurut Tjiptoherijanto urbanisasi pada umumnya adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota meskipun sebenarnya urbanisasi berarti persentase penduduk yang tinggal di sebuah perkotaan, sedangkan perpindahan penduduk dari desa ke kota hanya salah satu penyebab dari proses urbanisasi.²⁶

Tujuan utamanya urbanisasi adalah dimana masyarakat yang mencari kerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada masalah di balik tujuan urbanisasi yang baik. Dengan kata lain: pertumbuhan penduduk kota mengintensifkan pengembangan ruang kota. Hal ini mempengaruhi sistem ruang karena banyak digunakan sebagai lahan pemukiman bagi penduduk urban. Lebih jauh, Evers dan Abbas berpendapat bahwa urbanisasi yang terlalu sedikit mengabaikan kebutuhan kota dan menghambat kemajuan ekonomi dengan cara yang sama seperti urbanisasi yang terlalu banyak berdampak negatif pada kota.²⁷

²⁵ Alfi Yuda, 'Pengertian Urbanisasi Menurut Para Ahli, Faktor Penyebab, Tujuan, Dan Dampak Yang Terjadi - Ragam Bola.Com', *Bola.Com*, 2021 <<https://www.bola.com/ragam/read/4733374/pengertian-urbanisasi-menurut-para-ahli-faktor-penyebab-tujuan-dan-dampak-yang-terjadi>> [accessed 26 September 2022].

²⁶ Putri Anne Br Sembiring and Matius Bangun, 'Analisis Kebijakan Pengendalian Urbanisasi Kota Berastagi Kabupaten Karo Sumut', *Jurnal Darma Agung*, 29.2 (2021), 79 <<https://doi.org/10.46930/ojsuda.v29i2.935>>.

²⁷ Putri Anne Br Sembiring and Matius Bangun, 'Analisis Kebijakan Pengendalian Urbanisasi Kota Berastagi Kabupaten Karo Sumut', *Jurnal Darma Agung*, 29.2 (2021), 79 <<https://doi.org/10.46930/ojsuda.v29i2.935>>.

Dalam jurnal yang berjudul “Urbanisasi Dan Pertumbuhan kota-kota Di Indonesia: Suatu Perbandingan Antara Kawasan Makro Indonesia” yang ditulis oleh Fajar Hari Mardiansjah dan Paramita Rahayu. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai analisi perbedaan proses urbanisasi yang terjadi antar wilayah di Indonesia, melalui pemahaman terhadap perbedaan pertumbuhan kota-kota yang ada di setiap kawasan makro di Indonesia. Dinamika yang terjadi pada proses urbanisasi yang terjadi di Indonesia, terutama pada kota-kota terbesar di setiap bagian wilayah di Indonesia beserta perubahan urutannya dari tahun 2000 hingga 2015. Perkembangan kota di Indonesia ini tidak saja dipengaruhi kondisi wilayah setempat, melainkan juga dipengaruhi oleh dua hal lain, yaitu sejarah pembangunan infrastruktur dan wilayahnya, serta pengaturan dan pengelolaan kebijakan pemerintah yang berpengaruh, baik pemerintah Republik Indonesia maupun Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di masa sebelum kemerdekaan. Hingga kini, Kawasan Jawa masih menjadi tempat dimana sebagian besar dari kota-kota terbesar di Indonesia terkonsentrasi. Bahkan kawasan ini pun memiliki Kawasan Jabodetabek dan sekitarnya yang menjadi kawasan konsentrasi utama dari kota-kota terbesar Indonesia. Pengkonsentrasian Jakarta, sebagai pusat pemerintahan Negara yang sekaligus menjadi pusat aktivitas ekonomi, telah menghasilkan kekuatan pertumbuhan yang sangat besar sehingga tidak saja meningkatkan kekuatan pertumbuhan internalnya, tetapi juga menguatkan kekuatan pertumbuhan eksternalnya hingga mampu melahirkan kota-kota baru jutaan

penduduk lain di sekitarnya sambil menghasilkan sebuah aglomerasi perkotaan raksasa.²⁸

Tulisan yang berjudul “Tinjauan Migrasi Penduduk Desa-Kota, Urbanisasi Dan Dampaknya” yang ditulis oleh Suko Bandiyono dan Ken F. Dalam tulisan tersebut membahas tentang isu migrasi penduduk dari desa ke kota dalam hubungannya dengan urbanisasi. Keinginan seseorang untuk melakukan mobilitas didorong oleh rasa ingin mengembangkan diri dalam segi material. Migrasi penduduk adalah suatu respon dari adanya perbedaan keadaan lingkungan di mana mereka tinggal. Keadaan alam yang berubah-ubah, baik itu dalam kehidupan sosial masyarakat, fluktuasi kondisi ekonomi dan perkembangan penduduk selama siklus kehidupan, telah membuat penduduk melakukan aktivitas dari satu tempat ke tempat lain. Tiap daerah memiliki perbedaan pertumbuhan penduduk dan juga perbedaan perkembangan sosial ekonomi, sehingga menimbulkan peluang-kesempatan yang berbeda. Ravenstein mengatakan bahwa keinginan sebagian orang untuk bermigrasi adalah meningkatkan dirinya lebih baik dari segi materi. Motif ekonomi merupakan penyebab utama proses mobilitas selain alasan non-ekonomi. Alasan non-ekonomi yaitu memperoleh kesenangan yang lebih seperti lampu kota yang terang. Ia juga mengamati bahwa migrasi terjadi dalam arus baik yang menuju daerah tujuan maupun arus balik dalam arah yang berlawanan. Sebagian besar orang bermigrasi dari jarak dekat dan hanya sebagian kecil bermigrasi jarak jauh. Hal ini adalah atribut dari kenyataan bahwa seseorang akan bermigrasi untuk jarak yang lebih jauh bila akan memperoleh lebih banyak kesempatan. Isu penting

²⁸ Fadjar Hari Mardiansjah and Paramita Rahayu, ‘Urbanisasi Dan Pertumbuhan Kota-Kota Di Indonesia: Suatu Perbandingan Antar-Wilayah Makro Indonesia’, *Jurnal Pengembangan Kota*, 7.1 (2019), 91–110 <<https://doi.org/10.14710/jpk.7.1.91-108>>.

yang sering dilontarkan oleh perencana perkotaan adalah timbulnya fenomena kemiskinan yang diakibatkan oleh proses urbanisasi dan distribusi penduduk dalam sebuah proses pembangunan. Meskipun lebih dari dua pertiga penduduk Indonesia masih tinggal pada daerah pedesaan namun telah terjadi perpindahan penduduk secara internal yang menuju ke daerah perkotaan dalam jumlah yang besar dan terus mengalami peningkatan. Migrasi dari desa ke kota dapat dianggap sebagai faktor utama dalam mempengaruhi pertumbuhan penduduk kota ketika angka pertumbuhan penduduk mencapai $> 2,5$ persen setahun. Jika angka pertumbuhan penduduk kota berada di antara $2,0-2,5$ persen setahun maka telah dikembangkan bahwa pertumbuhan alami lebih dominan daripada faktor migrasi. Selanjutnya manakala angka pertumbuhan penduduk $< 2,5$ persen setahun berarti migrasi netto adalah, bahkan negatif. Oleh karena itu di kota-kota yang telah menjadi tujuan utama migrasi akan terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja sehingga muncul permasalahan-permasalahan yang selanjutnya diikuti dengan proses pemiskinan. Hal ini disebut sebagai fenomena "over-urbanization" involusi perkotaan.²⁹

Dalam tulisan yang berjudul "Fenomena Urbanisasi Dan Kebijakan Penyediaan Perumahan Dan Permukiman Di perkotaan Indonesia" yang ditulis oleh Mita Noveria. Dalam tulisan tersebut membahas mengenai isu perumahan dan permukiman yang terkait dengan fenomena urbanisasi, khususnya yang disebabkan oleh perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertumbuhan alami (selisih antara kelahiran dan kematian) penduduk perkotaan, migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan, serta perubahan

²⁹ Suko Bandiyono and Ken. F Indrawardani, 'Tinjauan Migrasi Penduduk Desa-Kota, Urbanisasi Dan Dampaknya', *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2010, 14.

klasifikasi daerah perkotaan. Perkembangan kota menjadi fokus perhatian internasional, baik dari sisi kebijakan maupun ilmu pengetahuan, karena dampaknya yang serius terhadap lingkungan global seperti konsumsi lahan yang besar, polusi udara, kelangkaan air bersih, kemiskinan, segregasi sosial, dan kerentanan. Pertumbuhan penduduk kota juga memunculkan permasalahan tersendiri bagi daerah tersebut. Salah satu di antaranya adalah pengadaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk, seperti perumahan, air bersih, fasilitas pendidikan, dan kesehatan. Fasilitas-fasilitas sosial lainnya untuk kegiatan kemasyarakatan, seperti ruang terbuka tempat berkumpul penduduk dan sarana olah raga juga harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka yang tinggal di wilayah perkotaan. Sampai saat ini, salah satu fokus perhatian yang terkait dengan tingginya pertumbuhan penduduk perkotaan adalah seputar upaya penyediaan tempat tinggal dan perbaikan kondisi kehidupan penduduk.³⁰

Perpindahan penduduk dari pedesaan menuju daerah perkotaan merupakan salah satu penyebab tingginya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan. Umumnya, faktor ekonomi memegang peranan penting dalam terjadinya mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk dilakukan dengan pertimbangan rasional yaitu untuk meningkatkan kondisi ekonomi, didasari oleh faktor pendorong di daerah asal dan faktor penarik di daerah tujuan mobilitas. Perbedaan pendapatan di wilayah pedesaan dan perkotaan pada umumnya, merupakan faktor dominan yang menyebabkan penduduk desa melakukan mobilitas ke perkotaan. Apabila pertumbuhan penduduk kota yang pesat, terutama akibat besarnya arus migrasi ke kota, tidak dapat

³⁰ Mita Noveria, 'Fenomena Urbanisasi Dan Kebijakan Penyediaan Perumahan Dan Permukiman Di Perkotaan Indonesia', *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 36.2 (2010), 103–24 <<http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jmi/article/view/643>>.

dikendalikan, maka berbagai persoalan yang terkait dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapi oleh pemerintah kota. Salah satu di antaranya adalah penyediaan tempat tinggal. Untuk menyediakan tempat tinggal bagi penduduk dalam jumlah yang besar, pemerintah daerah atau kota perlu memfasilitasi pengadaan perumahan bagi semua kelompok penduduk.

Adapun dalam penelitian ini saya berbeda dengan penelitian yang telah saya jelaskan sebelumnya dimana penelitian sebelumnya berisi mengenai kerjasama yang dilakukan antara *sub-state actor* melalui kerjasama *sister city* atau kota kembar yang merupakan kerjasama yang di dalamnya memuat kesepakatan antara dua daerah atau 2 aktor subnasional yang melintasi batas negara dengan tujuan membangun hubungan budaya dan kontak sosial antara daerah.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan meneliti kerjasama yang dilakukan oleh aktor *sub-state* atau pemerintah daerah yang berbeda negara, dari kawasan yang berbeda, dari berbagai belahan dunia yang disatukan dalam suatu perjanjian internasional untuk mencapai tujuan bersama. Penulis akan meneliti implementasi dari perjanjian internasional yang ditandatangani oleh suatu kota di Indonesia yaitu Kota Bandung yang berupaya untuk mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah sangatlah penting untuk menggunakan metode untuk mencapai suatu tujuan. Metode pada dasarnya adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengungkap suatu langkah-langkah, ataupun mengungkap suatu masalah yang akan ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan.

Pada penyusunan penelitian ini, untuk mengkaji atau menganalisis Implementasi *Milan Urban Food Policy Pact* (MUFPP) Dalam Pengembangan Sistem Pangan Berkelanjutan Di Kota Bandung, Peneliti akan mencoba untuk menggambarkan bagaimana kondisi pangan di Kota Bandung dan apakah kebutuhan pangan dengan hasil produksi pangan di Kota Bandung seimbang, kemudian melihat bagaimana sistem produksi pangan sebelum bergabung dalam MUFPP, Apa alasan yang mendasari Kota Bandung kemudian ingin bergabung dalam MUFPP, lalu menjabarkan kebijakan dan kerangka kerja MUFPP dalam pengembangan sistem pangan yang akan dilaksanakan oleh anggota yang tergabung, dan terakhir adalah melihat bagaimana implementasi pembangunan sistem pangan berkelanjutan di Kota Bandung berdasarkan kerangka kerja MUFPP.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dan dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan, selain itu penulis juga melakukan wawancara mendalam. Penelitian kualitatif berguna untuk menggali lebih dalam makna-makna yang terkandung dalam sebuah data

yang dikumpulkan. Untuk studi kepustakaan penulis mengumpulkan dan menelusuri catatan-catatan seperti artikel, buku, jurnal dan berita yang dirilis dari website resmi dari Kota Bandung dan MUFPP, Selain itu penulis juga akan menggunakan dokumen perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dan MUFPP atau yang kita sebut MoU dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data kualitatif menurut Sugiyono, merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan kokoh, dan juga memuat penjelasan tentang banyak proses yang terjadi di lingkungan setempat dimana pada hal ini yang menjadi kunci atau instrumennya adalah peneliti dengan pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan).³¹ Dengan mengumpulkan data dari pustaka online dan data dari Kantor kerjasama Kota Bandung. Kemudian data yang telah dikumpulkan direduksi untuk memisahkan data mana yang relevan dengan penelitian ini. Proses selanjutnya adalah menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan untuk mencari makna dari data yang telah di proses.

3.2 Kehadiran Peneliti

Pada penelitian kali ini, kunci atau instrumen dalam mengumpulkan data adalah peneliti itu sendiri. Singkatnya, peneliti yang bertindak sebagai pengumpul data. Data yang digunakan untuk penelitian kali ini merupakan data yang telah dikumpulkan melalui sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Rezim Internasional, dan juga bagaimana suatu daerah melakukan hubungan luar negeri atau yang disebut sebagai fenomena Paradiplomasi,

³¹ Gamal Thabroni, 'Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam - Serupa.Id', *Serupa.Id*, 2021 <<https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>> [accessed 11 June 2022].

selain itu juga konsep Urbanisasi dalam menjelaskan bagaimana kekhawatiran terhadap pangan dapat terjadi di suatu kota, maka penulis menggunakan beberapa literatur, buku dan jurnal. Selain itu peneliti juga akan melakukan wawancara dengan salah satu staf di bagian Kantor Kerjasama Kota Bandung.

Dalam hal ini, keberadaan peneliti juga hanya sebagai pengamat dimana peneliti hanya mengamati dalam hal ini maksudnya adalah tidak mengikuti atau menjadi partisipan dalam penelitian tersebut peneliti tidak menjadi partisipan dikarenakan peneliti tidak mengambil peran dalam proses yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung Dalam pengembangna sistem pangan berkelanjutan melalui *Milan Urban Food Policy Pact* (MUFPP). Keterlibatan peneliti dalam hal ini hanya pada proses pengumpulan data dan menganalisa data-data yang sudah ada sebelumnya untuk tujuan menjawab pertanyaan penelitian.

3.3 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan pengumpulan data secara online dari literatur yang telah ada dan juga wawancara langsung dengan staff Bagian Kantor Kerjasama Kota Bandung. Untuk kebutuhan literatur dan informasi, Penulis memanfaatkan teknologi dan juga wawancara untuk pengumpulan data, sebagai berikut.

- a. Perpustakaan online dari beberapa e-jurnal, e-book dan website resmi
- b. Bagian Kantor Kerjasama Kota Bandung

3.4 Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan pada penelitian kali ini adalah sumber data sekunder dan data primer. Data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui media perantara dengan kata lain pihak lain telah mengolah data tersebut terlebih dahulu (dicatat dan juga diperoleh oleh pihak lain). Data sekunder ini bisa berupa bukti, laporan historis maupun catatan yang telah tersusun dalam arsip. Contohnya dalam hal ini adalah berupa, gambaran umum, struktur organisasi maupun *job description* dari sebuah actor internasional baik itu *sub-state actor* dan organisasi itu sendiri sebagai wadah yang mempertemukan para *sub-state actor*. Sementara data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari tangan pertama. Contohnya seperti dokumen resmi dari instansi terkait yang diolah langsung oleh penulis. Pada penelitian ini, sumber data yang diperoleh peneliti adalah melalui buku, skripsi, majalah, jurnal, maupun website atau situs resmi, dan dokumen dari instansi yang menjadi subjek dalam penelitian ini, selain itu juga peneliti menggunakan data dari hasil wawancara yang dilakukan langsung oleh penulis.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah menggunakan pendekatan studi literatur atau *literature research*. Studi literatur, mengumpulkan data berdasarkan literatur yang memiliki relevansi sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dari penelitian tersebut. Dalam konteks ini, literatur yang masih berkaitan mengenai kerjasama yang dilakukan *sub-state actor* dan upaya penanganan permasalahan ketahanan pangan. Selain itu penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara.

3.6 Teknik analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik Analisis Konten atau Analisis Isi. Analisis isi (*content analysis*) merupakan teknik penelitian yang pembahasan mendalam mengenai isi dari suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Teknik analisis konten ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Pelopor analisis konten adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik *symbol coding*, dengan mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Terdapat beberapa definisi mengenai analisis isi. Analisis isi secara umum merupakan sebuah metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang lebih spesifik. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis berbagai bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi lainnya.³² Maka dalam penelitian ini penulis akan memahami keseluruhan tema pada data kualitatif yang akan dikumpulkan. Maka dalam metode penelitian ini, penulis akan menerapkan kode warna untuk tema atau ide tertentu. Penguraian data tekstual seperti ini untuk mempermudah proses penelitian ini menemukan rangkaian data yang paling umum.

3.7 Tahap-tahap Penelitian

BAB I PENDAHULUAN, peneliti membahas latar belakang mengapa permasalahan pangan perlu untuk diantisipasi dan permasalahan ini kemudian mendapat perhatian. Selain itu membahas tentang fokus

³² A.M.Irfan Tufan Asfar, 'Analisis Naratif, Analisis Konten, Dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)', 2019.

penelitian dan merumuskan permasalahan penelitian, selanjutnya adalah tujuan penelitian dan juga kegunaan atau manfaat dari penelitian tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini Penulis menjelaskan mengenai konsep dan teori yang digunakan dalam proses penelitian. Penulis menggunakan teori Rezim, Paradiplomasi dan konsep Urbanisasi yang mencoba untuk menjelaskan bagaimana rezim internasional dapat memberikan manfaat dan juga memahami bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh *sub-state actor* dalam menangani permasalahan daerahnya dan juga untuk mencapai kepentingannya. Selain itu konsep Urbanisasi untuk memahami bagaimana proses perpindahan penduduk memberikan dampak pada bagaimana kebutuhan pangan meningkat di suatu kota.

BAB III METODE PENELITIAN, membahas tentang uraian metode penelitian yang digunakan Penulis, mulai dari rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, Penulis akan memaparkan mengenai rumusan masalah yang timbul dari penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN, pada bab ini Penulis akan memberikan kesimpulan mengenai data yang telah diteliti dalam penelitian, saran serta kendala-kendala yang penulis alami dalam proses peneliti

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Kebijakan dan Kerangka Kerja MUFPP dalam pengembangan sistem pangan.

Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP) yang berasal dari kota Milan, Italia bermula saat keprihatinan atas kegagalan sistem pangan di kota Milan, Italia. Dari kejadian tersebut maka Kota Milan pada 2014 memulai kajian mengenai sistem pangan lokal dengan berfokus pada daur pangan, mulai dari konteks sampai dengan para pelaku dalam sistem pangan. Hasil kajian tersebut kemudian diperbincangkan dalam konsultasi publik yang melibatkan 700 pemangku kepentingan yang menghasilkan dirumuskan kebijakan pangan perkotaan yang komprehensif. Strategi kemudian menemukan lima bidang intervensi, dengan prioritas utama memerangi limbah pangan.³³

Berpijak dari hasil kajian sistem pangan lokal di Milan pada 2014, wali kota Milan Giuliano Pisapia yang menjabat pada tahun 2011-2016, memprakarsai jejaring kota-kota dunia yang peduli pada keberlanjutan sistem pangan. Kemudian pada tahun 2015 Milan menjadi tuan rumah pada agenda EXPO 2015 sebuah pameran dunia bertajuk "*Feeding the Planet, Energy for Life*" yang menghadirkan 145 negara dan 50 lembaga

³³ Andrea Calori, Francesca La Rocca, and Bianca Minotti, *Empowering Urban Youth for Food and Climate Action* (Milan: ShareAlike 4.0 International License, 2022).

internasional.³⁴ Pada kesempatan itu kemudian kota Milan meresmikan pakta Milan atau MUFPP.³⁵

Kota yang bergabung berkomitmen untuk mengembangkan sistem pangan yang inklusif, tangguh, aman, beragam dan berkelanjutan, untuk menyediakan dan melindungi keanekaragaman hayati dengan beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, dan untuk mendukung kota yang ingin mengembangkan sistem pangan perkotaan yang lebih berkelanjutan dan pertukaran praktik terbaik.³⁶

Tujuh komitmen yang ditandatangani para wali kota dalam Pakta Milan meliputi:³⁷

1. Menyediakan makanan yang sehat dan terjangkau untuk semua, berdasarkan kerangka kerja berbasis hak asasi manusia yang meminimalkan limbah dan melestarikan keanekaragaman hayati dengan beradaptasi dan mengurangi dampak perubahan iklim untuk mengembangkan sistem pangan yang inklusif, tangguh, aman, beragam, dan berkelanjutan.
2. Mempromosikan koordinasi kota antarsektor di tingkat masyarakat, mengintegrasikan pertimbangan kebijakan pangan kota dengan pertimbangan sosial dan ekonomi, dan bekerja untuk

³⁴ Budi Widianarko, 'Pakta Milan, Kota, Limbah Pangan | Portal Berita Unika Soegijapranata', 2019 <<https://news.unika.ac.id/2019/07/pakta-milan-kota-limbah-pangan/>> [accessed 27 August 2022].

³⁵ Budi Widianarko, 'Pakta Milan, Kota, Limbah Pangan | Portal Berita Unika Soegijapranata', 2019 <<https://news.unika.ac.id/2019/07/pakta-milan-kota-limbah-pangan/>> [accessed 27 August 2022].

³⁶ Andrea Calori, Francesca La Rocca, and Bianca Minotti, *Empowering Urban Youth for Food and Climate Action* (Milan: ShareAlike 4.0 International License, 2022).

³⁷ Budi Widianarko, 'Pakta Milan, Kota, Limbah Pangan | Portal Berita Unika Soegijapranata', 2019 <<https://news.unika.ac.id/2019/07/pakta-milan-kota-limbah-pangan/>> [accessed 27 August 2022].

mengintegrasikannya dengan kebijakan, program, dan inisiatif lingkungan, ketahanan pangan, dan pencegahan limbah.

3. Mengembangkan koordinasi antara kebijakan dan program gizi masyarakat dan kebijakan dan proses lokal, nasional, regional dan internasional yang relevan.
4. Melibatkan beragam sektor pengembangan sistem pangan (termasuk tokoh masyarakat, organisasi teknis dan akademis, masyarakat sipil, petani kecil dan sektor swasta) dalam perumusan, implementasi dan evaluasi semua kebijakan, program dan inisiatif pangan.
5. Meninjau dan ubah kebijakan, rencana, dan peraturan kota untuk mempromosikan sistem pangan yang adil, berkelanjutan, dan berkelanjutan.
6. Menggunakan kerangka aksi sebagai titik awal bagi setiap kota untuk mengembangkan sistem pangannya dan berbagi pembangunan dengan kota-kota yang berpartisipasi, pemerintah nasional dan organisasi internasional yang sesuai.
7. Mengajak kota-kota lain untuk terlibat dalam aksi kebijakan pangan ini.

Pakta Millan ini telah ditandatangani 100 kota dunia pada 15 Oktober 2015 di Milan saat peluncuran pertamanya. Karena sifatnya yang terbuka, jumlah kota yang bertanda-tangan terus bertambah, sampai saat ini terdapat 240 kota yang bergabung dengan total populasi 400 juta.³⁸ Setiap Anggota dalam MUFPP perlu untuk mengembangkan sistem pangan yang

³⁸ 'Milan Urban Food Policy Pact', 2022 <<https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/>> [accessed 27 August 2022].

berkelanjutan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati bersama. Dalam MUFPP terdapat kerangka kerja dan kebijakan dalam pengembangan sistem pangan berkelanjutan yang direkomendasikan. Terdapat kebijakan dan kerangka kerja dalam pengembangan sistem pangan berkelanjutan yang direkomendasikan dalam MUFPP dalam pengembangan sistem pangan di setiap kota yang bergabung di dalamnya. Milan Pact mendefinisikan sistem pangan berkelanjutan sebagai sistem pangan yang inklusif, tangguh, aman, beragam, ramah iklim dan sehat. Maka MUFPP memberikan kerangka kerja yang direkomendasikan untuk bertindak dalam tujuan pengembangan sistem pangan berkelanjutan bersifat sukarela. Tujuannya untuk memberikan opsi strategis bagi kota-kota yang bertujuan untuk mencapai sistem pangan yang lebih berkelanjutan. Berikut 37 kerangka kerja yang direkomendasikan MUFPP yang di dasari pada 6 kategori kebijakan diatas dapat dilihat pada lampiran dalam penelitian ini.³⁹

Seperti yang dijelaskan sebelumnya diatas bahwa awal permulaan dari terbentuknya perjanjian ini adalah kegagalan sistem pangan perkotaan di Milan, dimana ini sesuai dengan pendapat yang di berikan oleh Haggard & Simmons yang mengatakan bahwa kepentingan rezim timbul karena adanya ketidakpuasan, Maka dalam hal ini Kota Milan kemudian belajar dari sebuah kegagalan yang dialami dengan membuat suatu perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengembangkan sistem pangan di berbagai kota di seluruh dunia, sehingga berbagai kota di seluruh dunia dapat menjadi kota yang mandiri pangan dan masyarakat dapat tercukupi pangannya. Sehingga para pemangku kepentingan pada tahun 2015 yang hadir dalam EXPO 2015 tertarik dan bergabung di dalamnya.

³⁹ Kota Bandung and Milan Urban Food Policy Pact, *MoU* (Bandung, 2022).

Kota – kota yang bergabung dalam perjanjian internasional MUFPP ini kemudian berlandaskan pada MUFPP sebagai salah satu Rezim Internasional internasional yang memuat nilai, norma dan aturan yang memuat kepentingan aktor yang bergabung didalamnya. Sebagai sebuah perjanjian internasional yang melahirkan sebuah prosedur dan aturan yang eksplisit semua harapan para anggota berkumpul dalam gerakan bersama untuk mengembangkan sistem pangan berkelanjutan. Kerangka kerja dan kebijakan yang dituangkan dalam MOU dibangun berdasarkan pengalaman langsung dari kota-kota yang berpartisipasi dan memperhitungkan berbagai komitmen, tujuan, dan target yang relevan. Opsi-opsi tersebut telah diorganisasikan ke dalam kelompok-kelompok tematis, mereka harus dilihat sebagai titik masuk menuju pencapaian tujuan bersama dari sistem pangan berkelanjutan. Kota-kota dapat memilih, mengadaptasi, dan mengelompokkan opsi ke dalam pedoman sebagaimana diperlukan untuk menyesuaikan dengan situasi masing-masing kota. Sejak tahun 2015 hingga 2022 saat ini tercatat 370 bentuk pengembangan sistem yang telah di ciptakan oleh kota-kota yang bergabung dalam MUFPP.⁴⁰

4.2 Implementasi Pengembangan Sistem Pangan Berkelanjutan Di Kota Bandung Berdasarkan Kebijakan Dan Kerangka Kerja MUFPP

Kata implementasi yang sering digunakan oleh pemerintah atau individu mengenai peraturan dan perintah untuk mencapai tujuan bersama. Implementasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan.⁴¹ Sedangkan pengertian implementasi dalam

⁴⁰ 'Milan Urban Food Policy Pact', 2022 <<https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/>> [accessed 27 August 2022].

⁴¹ Siti Nur Aeni, 'Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor, Dan Contohnya - Lifestyle Katadata.Co.Id', *Datadata.Co.Id*, 2022

hubungan internasional adalah tahapan pembuatan perjanjian internasional. Ini mewakili tahap ketika ketentuan internasional diberlakukan di dalam negeri melalui undang-undang dan peraturan. Tahap implementasi berbeda dengan ratifikasi perjanjian internasional.⁴² Sementara dalam penelitian ini peneliti akan mengidentifikasi implementasi dari penerapan kebijakan dan kerangka kerja dari sebuah pakta perjanjian internasional. Tujuan dari implementasi adalah mewujudkan sebuah rencana yang sudah disusun agar bisa terwujud secara nyata.⁴³ Keberhasilan dari implementasi dipengaruhi dari isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi, antara lain: Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan, Jenis manfaat yang diterima oleh target grup, dan Progres perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.

Kota Bandung saat ini telah menjadi kota yang sangat maju dengan industrialisasi yang terjadi, bersamaan dengan hal itu berkurangnya lahan pertanian menjadi permasalahan yang dihadapi Kota Bandung akibat proses urbanisasi yang terjadi. Akibatnya penambahan jumlah penduduk serta terjadinya alih fungsi lahan menjadi pabrik, perumahan dan juga mall memberikan Kota Bandung tugas yang cukup penting untuk memperhatikan bagaimana keberlangsungan dan masa depan kecukupan pangan di Kota Bandung. Kekhawatiran terhadap pasokan pangan di masa yang akan datang, faktanya hampir 2,5 juta penduduk Kota Bandung saat ini dicukupi

<<https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya>> [accessed 27 August 2022].

⁴² Imelda Rahma, 'Implementasi Adalah Tindakan Merealisasikan Rencana, Ketahui Pengertian Dan Contohnya - Lifestyle Fimela.Com', *Fimela*, 2021 <<https://www.fimela.com/lifestyle/read/4531029/implementasi-adalah-tindakan-merealisasikan-rencana-ketahui-pengertian-dan-contohnya>> [accessed 27 August 2022].

⁴³ Nur Aeni.

kebutuhan pangannya dari luar kota.⁴⁴ Hal ini melatarbelakangi langkah Pemerintah Kota Bandung dalam mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan.⁴⁵ Data Distan Kota Bandung menunjukkan bagaimana lahan persawahan berkurang dengan cepat. Pada 2017, luas lahan persawahan di Kota Bandung mencapai 720 hektare (ha) dan pada 2018 berkurang jadi 623 ha.⁴⁶ Disamping itu, untuk memenuhi kebutuhan pangan 2,4 juta warganya, Pemkot Bandung memasok 96% bahan pangan dari luar kota. Sebagai kota metropolitan, Kota Bandung minim lahan pertanian.⁴⁷ Dari fakta ini kita dapat melihat bahwa Pemerintah Kota Bandung perlu untuk mengembangkan sistem pangan berkelanjutan, karena semakin berkurangnya lahan pertanian akan berakibat pada bagaimana Kota Bandung dapat menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakatnya, jika daerah yang mensuplai pangan ke Kota Bandung di kemudian hari mengalami permasalahan ketersediaan juga maka daerah tersebut pasti akan lebih mengutamakan daerahnya terlebih dahulu dibanding kota atau daerah lain.

Dalam pembuktian keseriusan Pemerintah Kota Bandung dalam pengembangan sistem pangan berkelanjutan maka Pemerintah Kota Bandung bergabung dalam MUFPP pada 06 Agustus 2020. Pemerintah Kota Bandung dan berbagai kota di seluruh dunia yang bergabung dalam MUFPP

⁴⁴ Aji Kusmawan, '96% Kebutuhan Pangan Warga Kota Bandung Dipasok Luar Kota – Dara.Co.Id', *Dara.Co.Id*, 2019 <<https://www.dara.co.id/96-kebutuhan-pangan-warga-kota-bandung-dipasok-luar-kota.html>> [accessed 28 August 2022].

⁴⁵ Wulan, 'Gelar Konferensi Urban Farming Internasional, Kota Bandung Fokus Pada Sistem Pangan Berkelanjutan - Harmoni Online', *Harmonionline.Net*, 2022 <<https://harmonionline.net/2022/08/02/gelar-konferensi-urban-farming-internasional-kota-bandung-fokus-pada-sistem-pangan-berkelanjutan/>> [accessed 27 August 2022].

⁴⁶ 'Setiap Tahun, Lahan Sawah Di Kota Bandung Berkurang', *Pindainews.Com*, 2019 <<https://www.pindainews.com/berita/5067/setiap-tahun-lahan-sawah-di-kota-bandung-berkurang>> [accessed 27 August 2022].

⁴⁷ Aji Kusmawan, '96% Kebutuhan Pangan Warga Kota Bandung Dipasok Luar Kota – Dara.Co.Id', *Dara.Co.Id*, 2019 <<https://www.dara.co.id/96-kebutuhan-pangan-warga-kota-bandung-dipasok-luar-kota.html>> [accessed 28 August 2022].

dapat Bersama-sama mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan dan juga saling bertukar konsep penanganan pangan yang di kembangkan di masing-masing kota. Kota Bandung menjadi kota pertama di Asia tenggara yang menjadi anggota dalam MUFPP.⁴⁸

Kota Bandung telah bergabung dalam MUFPP sejak tahun 2020 dan saat ini telah memasuki tahun ketiga bergabungnya Kota Bandung dalam MUFPP sebagai Kota pertama di Asia tenggara yang bergabung dalam MUFPP. Kota yang telah bergabung dalam MUFPP berkomitmen untuk mengembangkan sistem pangan berkelanjutan bersama kota lainnya dari berbagai kawasan dan negara yang bergabung di dalamnya. MUFPP memiliki Kebijakan dan Kerangka Kerja yang direkomendasikan dalam pengembangan sistem pangan. Kerangka kerja atau rekomendasi action dalam MUFPP tersebut dapat dipilih untuk menangani permasalahan pangan maupun dalam pengembangan sistem pangan berkelanjutan di kota-kota yang telah bergabung di dalamnya dengan menyesuaikan dengan kondisi, permasalahan dan kemampuan dari kota tersebut. Kota Bandung sendiri mengalami permasalahan pasokan pangan, yang mana Kota Bandung masih bergantung dengan daerah luar dalam hal kebutuhan pangan, ini diakibatkan oleh terjadinya alihfungsih lahan. Selain itu permasalahan yang dihadapi oleh Kota Bandung yaitu tingginya jumlah sampah makanan yang dihasilkan sekitar 1.600 ton setiap tahunnya.⁴⁹

Kota Bandung dalam pengembangan sistem panga yang berkelanjutan mengambil langkah yaitu dengan bergabung dalam sebuah

⁴⁸ Dhea, 'Wawancara Tidak Terstruktur Dengan Staf Baginan Kerjasama Luar Negeri', 2022.

⁴⁹ Agus Permana, *Wawancara Tidak Terstruktur Dengan Staf Evaluasi, Administrasi Dan Dokumentasi*, 2021.

perjanjian internasional yaitu MUFPP, dimana tujuan bergabungnya Kota Bandung dalam MUFPP adalah untuk lebih mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan dengan harapan bahwa Kota Bandung dapat menjadi kota yang mandiri pangan, melalui sistem pangan yang berkelanjutan juga diharapkan dapat memberikan solusi dalam meminimalisir sampah makanan. Melalui sebuah perjanjian internasional yang didalamnya kemudian memberikan rekomendasi aksi dalam pengembangan sistem pangan berkelanjutan, Bersama dengan kota dari berbagai kawasan dan negara yang berbeda namun satu dalam tujuan mengembangkan sistem pangan berkelanjutan dan memiliki niat, keprihatinan mengenai pangan, maka para anggota dapat bertukar informasi dan konsep sistem pangan yang lebih berkelanjutan.

Kegiatan yang dilakukan Kota Bandung ini merupakan salah satu bentuk dari paradiplomasi, dimana Kota Bandung sebagai *sub-state actor* bergabung dalam sebuah perjanjian internasional dan bekerjasama dengan kota - kota lain dari berbagai negara untuk mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan. Kota atau aktor *sub-state* yang melakukan praktek Paradiplomasi bertujuan untuk menangani permasalahan kota atau daerahnya dengan itu setiap daerah yang sesuai dengan kepentingannya. Kota Bandung sendiri masuk dalam sebuah perjanjian internasional yaitu MUFPP bertujuan untuk mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan yang diharapkan dengan masuknya dalam MUFPP, maka Kota Bandung dapat meningkatkan produksi pangan sehingga dapat menjadi kota yang mandiri pangan dan tidak bergantung dengan daerah lain. Dari fenomena ini jika dilihat menggunakan konsep *micro-diplomacy* dari Ivo Duchacek terdapat 3 konsep. Kerjasama yang dilakukan oleh Kota Bandung

ini termasuk dalam konsep *global paradiplomacy* yaitu hubungan diplomasi yang dilakukan pemerintah daerah yang berbeda negara, dari kawasan yang berbeda, dari berbagai belahan dunia. Dalam MUFPP terdapat berbagai kota dari Kawasan dan negara yang berbeda. Contohnya seperti Kota Bandung, Indonesia dari kawasan Asia pasifik, Kota Copenhagen, Denmark dari kawasan Eropa, Kota Bamako, Mali dari kawasan Afrika, Kota Cordoba, Argentina dari kawasan Amerika Selatan, dan masih banyak lagi kota dari berbagai kawasan dan negara lainnya, total dari anggota MUFPP saat ini yaitu 240 kota.⁵⁰

Dalam implementasi aksi pengembangan sistem pangan berkelanjutan di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung membuat program Bandung *Food Smart City* yang bertujuan membuat Kota Bandung menjadi kota cerdas pangan yang sebagian besar kegiatannya pada edukasi terkait pentingnya menghargai pangan menjadi hal yang penting untuk diajarkan kepada masyarakat. Bandung *Food Smart City* ini sebagai salah satu bagian dari Implementasi dari MUFPP. Program - program tersebut antara lain, Kampanye, *Urban Farming*, dan *Food Sharing* dalam memenuhi ketersediaan pangan.⁵¹

Kota Bandung mengadopsi beberapa action yang sesuai dengan rekomendasi action yang ada dalam MUFPP dan juga meningkatkan program atau upaya yang sudah ada sebelumnya sesuai pada rekomendasi aksi dari MUFPP. Berikut Implementasi MUFPP dalam pengembangan sistem pangan berkelanjutan di Kota Bandung Sejak tahun 2020 - 2022:

⁵⁰ 'About Milan Urban Food Policy Pact', *Milan Urban Food Policy Pact*, 2022 <<https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/>> [accessed 7 October 2022].

⁵¹ Bandung Food Smart City' <<https://bandungfoodsmartcity.org/about-us-2/>> [accessed 11 January 2022].

1. Buruan Sehat Alami, dan Ekonomis (SAE)

Program ini sesuai dengan kategori kebijakan nomor 4 yaitu produksi makanan yang mana dalam program ini Kota Bandung telah mengimplementasikan rekomendasi aksi atau kerangka kerja dalam MUFPP no.22 - no.26 yaitu memperkuat produksi dan pemrosesan pangan perkotaan dan pinggiran kota berdasarkan pendekatan berkelanjutan dan mengintegrasikan pertanian perkotaan dan pinggiran kota ke dalam rencana ketahanan kota. Kota Bandung yang terus mengalami pengurangan lahan pertanian dapat mengambil langkah ini, namun para pemangku kepentingan menyelaraskan program Buruan Sehat, Alami dan Ekonomis (SAE) yang dibuat dengan kondisi pinggiran perkotaan berdasarkan pendekatan berkelanjutan. Program ini merupakan program *urban farming* dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar pekarangan rumah warga, paling tidak dapat memenuhi pangan satu keluarga. Program ini sesuai dengan kebijakan nomor 4 MUFPP, dimana Buruan SAE ini diharap dapat memperkuat produksi dalam kota, dengan memanfaatkan pekarangan rumah yang kosong untuk mengolahnya menjadi bermanfaat dengan penanaman pangan.

Sejak bergabung dengan MUFPP pada 06 Agustus 2022 Kota Bandung mulai menunjukkan keseriusannya dalam pengembangan sistem pangan berkelanjutan dengan meluncurkan program Buruan SAE yaitu bentuk *urban farming* yang sangat cocok dengan kondisi Kota Bandung yang sudah padat. Buruan SAE diluncurkan pada bulan september 2020 setelah satu bulan bergabung dengan MUFPP. Jumlah titik lokasi buruan SAE di Kota Bandung setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berikut tabel yang menunjukkan angka jumlah lokasi dari Buruan SAE.

Tabel 4.1 Peningkatan Jumlah Titik Lokasi Buruan SAE di Kota Bandung

No.	Tahun	Jumlah Titik Lokasi
1.	2020	194 Lokasi
2.	2021	234 Lokasi
3.	2022	335 Lokasi

Sumber : Artikel Berita Inspiratif.com⁵²

Sejak resmi dikeluarkan pada September 2020, dimana saat peresmiannya terdapat 7 lahan Buruan SAE, lalu kemudian pihak Pemerintah Kota Bandung pada 2020 memberikan suntikan intervensi terhadap 60 titik pembuatan Buruan SAE, dan di akhir tahun 2020 terdapat 194 lokasi yang titik Buruan SAE.⁵³ Di tahun 2021 Kota Bandung menargetkan akan menambah 40 titik. Yang pada akhir tahun 2021 total lokasi mencapai 234 titik.⁵⁴ Namun ternyata pada tahun 2022 telah tercatat 335 titik Buruan Sae di Kota Bandung.⁵⁵

⁵² Ragam, '234 Titik Buruan SAE Tersebar Di Seluruh Kelurahan Di Kota Bandung', *Berita Inspiratif*, 2021 <<https://www.beritainspiratif.com/read/64254/234-titik-buruan-sae-tersebar-di-seluruh-kelurahan-di-kota-bandung>> [accessed 3 September 2022].

⁵³ Ragam, '234 Titik Buruan SAE Tersebar Di Seluruh Kelurahan Di Kota Bandung', *Berita Inspiratif*, 2021 <<https://www.beritainspiratif.com/read/64254/234-titik-buruan-sae-tersebar-di-seluruh-kelurahan-di-kota-bandung>> [accessed 3 September 2022].

⁵⁴ Ragam, '234 Titik Buruan SAE Tersebar Di Seluruh Kelurahan Di Kota Bandung', *Berita Inspiratif*, 2021 <<https://www.beritainspiratif.com/read/64254/234-titik-buruan-sae-tersebar-di-seluruh-kelurahan-di-kota-bandung>> [accessed 3 September 2022].

⁵⁵ 'Kota Bandung Miliki 335 Buruan SAE', *Golali.Id*, 2022 <<https://golali.id/kota-bandung-miliki-335-buruan-sae/>> [accessed 3 September 2022].

Gambar 4.1 Buruan SAE di RW 4 Kel. Cipaganti Kec. Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat



Sumber: Website resmi Buruan Sae⁵⁶

Buruan SAE di RW 4 Kel. Cipaganti Kec. Coblong, atau yang dikenal sebagai Buruan SAE Seribu karena luas lahan 100 m² yang terus dikembangkan dan diperluas hingga saat ini, Buruan SAE ini adalah salah satu titik Buruan SAE di Kota Bandung. Buruan SAE seribu memiliki 26 anggota dan di ketua kelompok oleh Wahyu. Kelompok Buruan SAE ini memanfaatkan lahan pinggir jalan RT 7 dan juga diatas sungai yang melewati pemukiman warga. Namun kelompok Buruan SAE ini sendiri masih pada lingkup penanaman sayur dan perikanan. Lokasi lahannya sangat strategis terletak di tengah – tengah pemukiman warga sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat edukasi selain untuk mencapai tujuan utamanya yaitu menciptakan ketahanan pangan mulai dari tingkat terkecil.⁵⁷

Distribusi bantuan sarana dari Dinas Pangan dan Pertanian (DPP) Kota Bandung Buruan SAE dilaksanakan secara bertahap yang dimulai pada tanggal 28 Maret 2022. Adapun bantuan sarana yang diberikan

⁵⁶ 'Buruan SAE', Buruan SAE<<https://buruansae.bandung.go.id/index.php/category/artikel/>> [accessed 31 August 2022].

⁵⁷ 'Buruan SAE', Buruan SAE<<https://buruansae.bandung.go.id/index.php/category/artikel/>> [accessed 31 August 2022].

yaitu berupa bibit dan benih, media tanam, benih ikan lele dan sarana budikdambarnya, Otega, ayam petelur dan lain – lain. Penataan lahan Buruan SAE Sajuta Seratus dilakukan secara bertahap mulai dari penataan lahan hingga penataan lokasi per komoditinya. Pada tahun berikutnya diharapkan Buruan SAE Sajuta Seratus dapat menjadi pusat edukasi pertanian bagi masyarakat RW 4 Kel. Cipaganti khususnya maupun masyarakat Kota Bandung pada umumnya.⁵⁸

Kota Bandung mengirimkan praktik Buruan SAE pada *Milan Pact Talks* yang dilakukan secara online. Sebagai anggota dalam MUFPP Kota Bandung wajib mengikuti kegiatan ini. Dalam agenda ini, kota yang bergabung dapat saling bertukar informasi mengenai pengembangan sistem pangan. *Milan Pact Talks* merupakan pengganti dari agenda tahunan MUFPP yaitu *Milan Pact Awards* yang setiap tahunnya dilaksanakan namun karena pandemi covid-19 maka MUFPP merubah agenda tersebut dalam sistem daring dengan nama *Milan Pact Talks*.

Setelah dikirim dalam agenda *Milan Pact Talks*, Pada 1 November 2021 MUFPP membuat agenda yaitu Global Forum *Milan Urban Food Policy Pact* (MUFPP). Dimana dalam agenda tersebut Buruan SAE Kota Bandung dipresentasikan dan mendapat surat penghargaan dari Kota Milan dan Barcelona setelah mempresentasikan program Buruan SAE di depan 500 partisipan dari 150 kota seluruh dunia dari latar belakang ilmuwan, agen internasional, dan organisasi masyarakat sipil.⁵⁹

⁵⁸'Buruan SAE', Buruan SAE<<https://buruansae.bandung.go.id/index.php/category/artikel/>> [accessed 31 August 2022].

⁵⁹ Tiah SM, 'Buruan SAE DKPP Kota Bandung Raih Penghargaan Nasional Dan Internasional, Makin Terasa Manfaatnya - Halaman 2 - TribunJabar.Id', *TribunJabar.Id*, 2021 <<https://jabar.tribunnews.com/2021/11/18/buruan-sae-dkpp-kota-bandung-raih->

Program ini sangat cocok dengan Kota Bandung dimana sebelumnya Kota Bandung mendapatkan suplai pangan dari luar kota dikarenakan alih fungsi lahan yang telah berubah menjadi perumahan, mall dan pabrik. sehingga Kota Bandung membuat Buruan SAE yang sesuai dengan kondisi Kota Bandung dimana konsep urban farming ini yaitu memanfaatkan halaman kosong untuk dimanfaatkan dalam memproduksi pangan minimal dapat memberikan makan satu keluarga. Program Buruan SAE ini telah mengalami perkembangan dimana hasil pangan dari Buruan SAE ini telah dijual dan dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Program ini pula menjadi wujud dari di upaya pengaplikasian poin ke 2 dalam SGDs yaitu mengakhiri kelaparan, karena dengan program Buruan SAE ini diharapkan dapat menjamin makanan bagi masyarakat setempat sehingga Kota Bandung terhindar dari masalah kelaparan.

Pencapaian dari program Buruan SAE ini telah sampai pada level internasional dimana pada agenda forum regional U20 di Kota Bandung, pada agenda hari kedua yaitu kunjungan pada lokasi Buruan SAE dimana berbagai negara mengapreseasi dan menjadikannya sebagai tempat penelitian atau studi banding. Salah satunya adalah Kota Roma, Italia.⁶⁰

penghargaan-nasional-dan-internasional-makin-terasa-manfaatnya?page=2> [accessed 28 August 2022].

⁶⁰ Ramadhan ZB, 'Program Kota Bandung Buruan Sae Menginspirasi Dunia Internasional Di Konferensi U-20 - Zona Bandung', *Zona Bandung.Com*, 2022 <<https://www.zonabandung.com/bandung-raya/pr-1204067532/program-kota-bandung-buruan-sae-menginspirasi-dunia-internasional-di-konferensi-u-20?page=1>> [accessed 31 August 2022].

2. Program Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan (Kang Pisman)

Program ini sesuai dengan kategori kebijakan nomor 6 yaitu sampah makanan yang mana dalam program ini Kota Bandung telah mengimplementasikan rekomendasi aksi atau kerangka kerja dalam MUFPP no.34 - no.37 yaitu Para pemimpin kota dan pembuat kebijakan yang ingin mengurangi limbah makanan, serta mengolahnya dengan cara yang lebih berkelanjutan dapat mengadopsi pendekatan ekonomi sirkular.

Program Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan (Kang Prisman) sesuai dengan kebijakan MUFPP nomor 6, dimana program Kang Pisman ini bertujuan untuk mengurangi limbah makanan dan kemudian dikelola dan memiliki nilai. Program ini bersifat masif dan dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat, dimana masyarakat dapat mengolah sampahnya secara mandiri. Dengan metode yang dipilih sendiri dan disesuaikan dengan sumber sampah, sarana dan pengetahuan yang dimiliki masing-masing masyarakat. Pengelolaan sampah ini dengan melibatkan masyarakat dalam memisahkan sampah sebelum di proses dan nantinya diintegrasikan pada pertanian ketika telah diolah menjadi pupuk yang bermanfaat.

Berdasarkan data dari Sistem informasi pengelolaan sampah Nasional Kota Bandung pada tahun 2019 menghasilkan sampah makan 42,00 % lalu pada tahun 2020 meningkat menjadi 43,00 % dan pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 44;52 % Dalam hal sampah makanan Kota Bandung sejak tahun 2019 hingga 2021 selalu mengalami peningkatan sampah makanan.⁶¹ Maka berdasarkan fakta tersebut maka dibuatlah sebuah program yaitu Kurangi Pisahkan, Manfaatkan (Kang Pisman) untuk

⁶¹ 'Komposisi Sampah ', *SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional* <<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>> [accessed 31 August 2022].

menangani permasalahan sampah makan di Kota Bandung. Program Kang Pisman ini telah ada sejak 4 tahun sejak tahun 2019, Namun berdasarkan data sebelumnya dapat dilihat bahwa program ini belum dapat menurunkan jumlah sampah makanan di Kota Bandung, Faktanya sejak tahun 2019 - 2021 sampah makanan terus mengalami kenaikan. Hal ini karena kurangnya partisipasi dari masyarakat pada tahun 2021.⁶²

Gambar 4.2 Kegiatan Kang Pisman di Babakan Sari, Kecamatan Kiaracandong⁶³



Sumber: Website resmi Kang Pisman

Namun pada tahun 2022 ini mengalami sedikit perkembangan, program ini berhasil mengurangi sampah makanan sekitar 2,5 ton di daerah Dago Bengkok melalui fasilitas TPS-3R, masyarakat mengubah sampah menjadi memiliki nilai lagi, dengan mengubah sampah organik menjadi

⁶² rifki Abdul fahmi, 'DPRD Kota Bandung Soroti Program Kang Pisman Yang Masih Kurang Partisipasi Dari Masyarakat - PRFM News', *Prfnews.Id*, 2021 <<https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/bandung-roya/pr-132641446/dprd-kota-bandung-soroti-program-kang-pisman-yang-masih-kurang-partisipasi-dari-masyarakat>> [accessed 28 August 2022].

⁶³ 'DELAPAN KELURAHAN JADI ROLE MODEL KAWASAN BEBAS SAMPAH – Kang Pisman', *Kangpisman.Com* <<https://www.kangpisman.com/delapan-kelurahan-jadi-role-model-kawasan-bebas-sampah/>> [accessed 3 September 2022].

pupuk. Ketua Kelompok Swadaya Mandiri TPS 3R Hedy Wibowo mengatakan, berkat kemandirian warga dalam mengolah sampah dari rumah, sebanyak 40 persen jumlah sampah tidak dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).⁶⁴ Program ini sejalan dengan poin SGDs nomor 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dimana melalui program ini masyarakat dapat memiliki sifat bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan.

Program ini memang telah ada sebelum Kota Bandung bergabung dalam MUFPP. Namun program ini tidak terlalu memberikan hasil yang signifikan dikarenakan kurangnya respon masyarakat terkait hal ini. Setelah bergabung dalam MUFPP Kota Bandung kini lebih gencar dalam menangani permasalahan sampah makanan di Kota Bandung dengan peningkatan sosialisasi program Kang Pisman. Kota Bandung juga memasukan program Kang Pisman dalam Tujuan regionalnya dalam MUFPP yaitu mempromosikan program ini.

3. Kampanye edukasi mengenai pangan

Program ini sesuai dengan kategori kebijakan nomor 6 yaitu sampah makanan yang mana dalam program ini Kota Bandung telah mengimplementasikan rekomendasi aksi atau kerangka kerja dalam MUFPP no.35 yaitu Meningkatkan kesadaran akan kehilangan dan pemborosan pangan melalui acara dan kampanye yang ditargetkan, mengidentifikasi titik

⁶⁴ Ahmad Faruk Syaibani, 'Kurangi Sampah 2,5 Ton,Warga Di Dago Bengkok Ini Kompak Terapkan Kang Pisman - PRFM News - Halaman 2', *Prmnews.Id*, 2022 <<https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/bandung-rayu/pr-135001720/kurangi-sampah-25-tonwarga-di-dago-bengkok-ini-kompak-terapkan-kang-pisman?page=2>> [accessed 28 August 2022].

pusat seperti Lembaga Pendidikan, pasar masyarakat, toko perusahaan dan inisiatif solidaritas atau lingkaran ekonomi lainnya.

Berdasarkan rekomendasi aksi dari MUFPP maka Kota Bandung kemudian membuat kampanye mengenai pangan ini memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya menghargai pangan dengan mengurangi pangan yang terbuang. hal ini bertujuan agar sampah makanan yang dihasilkan di Kota Bandung dapat berkurang. Kampanye yang dilakukan diberi nama Food Racing, Kampanye melalui games yang diberi nama "*Food Racing*" ini dilakukan ke beberapa sekolah di Kota Bandung yaitu, SMAK BPPK, SMPN 2 Bandung dan SMA Trinitas dengan jumlah audiens rata-rata melebihi 300 anak. Permainan ini bertujuan memberikan penyadaran terhadap kaum muda (kaum millennial) bahwa belanja makanan itu harus bijak dan memberikan penyadaran juga bahwa makanan yang tersisa di piring atau minuman yang tersisa di gelas minuman kalian itu berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar dan bahkan berdampak buruk bagi bumi. Setelah permainan selesai, maka peserta diajak berkumpul, kemudian tim melakukan *camping* dan bertanya pendapat peserta atau melakukan evaluasi mengenai apa yang mereka rasakan setelah bermain "*food racing*". Peserta mulai sadar ternyata gaya hidup yang dijalankan selama ini salah dan mulai berkomitmen untuk merubah gaya hidup yang sebelumnya *food waste* menjadi *anti food waste*.⁶⁵

⁶⁵ 'Program Bandung Food Smart City', *Bandung Food Smart City* <<https://bandungfoodsmartcity.org/program/>> [accessed 31 August 2022].

Gambar 4.3 Dokumentasi kegiatan Kampanye *food racing*⁶⁶



Sumber: Website resmi Bandung Food Smart City

Kampanye ini dilakukan untuk menanamkan edukasi mengenai sampah makanan yang selalu meningkat akibat dari perbuatan tidak bertanggung jawab dari manusia itu sendiri. Maka generasi muda perlu untuk diajarkan sejak dini mengenai pentingnya untuk menghargai makanan dan tidak menyisakan makanan. Sehingga dari kegiatan kampanye ini diharapkan kedepannya dapat mengurangi jumlah hasil dari sampah pangan.

4. Badami

Program ini sesuai dengan kategori kebijakan nomor 3 yaitu keadilan sosial dan ekonomi yang mana dalam program ini Kota Bandung telah mengimplementasikan rekomendasi aksi atau kerangka kerja dalam MUFPP no.17 dan no.18 yaitu mendorong, mendukung kegiatan ekonomi sosial dan solidaritas, memberikan perhatian khusus pada kegiatan terkait

⁶⁶ 'Program Bandung Food Smart City', *Bandung Food Smart City* <<https://bandungfoodsmartcity.org/program/>> [accessed 31 August 2022].

makanan, mendukung mata pencaharian berkelanjutan untuk populasi yang terpinggirkan di berbagai tingkat rantai makanan dan fasilitas akses ke makanan yang aman dan sehat di daerah perkotaan dan pedesaan. Pada poin no.18 juga direkomendasikan aksi untuk melakukan promosi jaringan dan mendukung kegiatan akar rumput (seperti dapur makanan masyarakat, pantry sosial, dll) yang menciptakan inklusi sosial dan menyediakan makanan untuk individu yang terpinggirkan.

Berdasarkan rekomendasi aksi yang ada dalam MUFPP maka Kota Bandung saat masa pandemi Covid-19 dimana hampir semua lapisan masyarakat terkena dampak ekonomi dari wabah ini. Kota Bandung pada 2021 melalui Forum Badami program *food rescue* yang bertujuan untuk memberi makan pada orang yang membutuhkan atau sering disebut *food sharing*.⁶⁷ Melalui website resmi Badami.

⁶⁷ Dhea, 'Wawancara Tidak Terstruktur Dengan Staf Bagian Kerjasama Luar Negeri', 2022.

Gambar 4.4 Website resmi Badami *food sharing*⁶⁸

The screenshot shows the homepage of the Badami Food Sharing website. At the top left is the Badami logo, and at the top right are 'Sign In' and 'Sign Up' buttons. A prominent banner encourages users to donate food through the 'berbagi' feature on smartfood.badami.id to reduce food waste. Below this, there are six featured campaigns:

Campaign Name	Goal Amount	Status
Berbagi 10 Ribu Roti untuk Sesama	Rp 2.555.000	Tercapai
Berbagi Bibit	Rp 2.300.000	Tercapai
Aksi Ceban Pertama untuk pekerja dan a	Rp 311.000	Tercapai
Bantu UMKM Berdaya Bantu Kaum Dhuafa	Rp 14.000.000	Tercapai
Bandung Berbagi #Kita Beli Kita Bagi	Rp 5.360.000	Berakhir
Berbagi Paket Berbuka Puasa	Rp 7.251.000	Tercapai

Sumber: Website resmi Badami *food sharing*

Sistem dari Badami *food sharing* ini yaitu dengan mendeliverikan makanan pada orang yang membutuhkan atau juga dapat dilakukan dengan mendonasikan berupa uang dan selain itu juga dapat dengan melakukan pembelian pada produk UMKM lokal. Tujuan dari program ini adalah agar tidak ada orang yang mengalami kekurangan pangan dan kelaparan.

Program ini juga sesuai dengan rekomendasi aksi nomor 18 yaitu Mempromosikan jaringan dan mendukung kegiatan akar rumput (seperti dapur makanan masyarakat, pantry sosial, dll.) yang menciptakan inklusi sosial dan menyediakan makanan untuk individu yang terpinggirkan. Jika dilihat dalam agenda SDGs maka program ini masuk dalam poin agenda nomor 2 yaitu mengakhiri kelaparan, dimana pada saat pandemic banyak

⁶⁸ 'Smartfood', *Badami Food Sharing* <<https://smartfood.badami.id/>> [accessed 3 September 2022].

orang yang mengalami permasalahan ekonomi yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan pangan pada masyarakat kalangan bawah.

5. Aplikasi Arimbi

Program ini sesuai dengan kategori kebijakan nomor 4 yaitu tata kelola yang mana dalam program ini Kota Bandung telah mengimplementasikan rekomendasi aksi atau kerangka kerja dalam MUFPP no.5 yaitu mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi multi sektoral untuk pengembangan kebijakan dan akuntabilitas dengan meningkatkan ketersediaan, kualitas, cakupan dan manajerial dan pertukaran data yang terkait dengan sistem pangan perkotaan, termasuk pengumpulan data formal dan data yang dihasilkan oleh masyarakat sipil dan mitra lainnya.

Berdasarkan rekomendasi aksi tersebut maka Kota Bandung dalam Pengimplementasiannya membuat suatu aplikasi yaitu aplikasi Arimbi yang berguna dalam memudahkan masyarakat untuk mengetahui harga pasar pangan. Aplikasi ini dibuat berdasarkan latar belakang bagaimana budaya hidup masyarakat perkotaan sebelum pandemi Covid-19, dimana masyarakat cenderung bergaya hidup mewah dengan pola hidup yang sangat boros seperti memesan makanan jadi dan hangout keluar dan berbelanja makanan yang sangat mahal. Namun pada masa pandemic Covid-19 banyak dari lapisan masyarakat yang dulunya hidup dengan pola hidup seperti itu kini harus beralih pada pola hidup yang lebih hemat dengan cara membeli bahan masak di pasar dan membuat makan sendiri. Kendala yang dialami oleh masyarakat tersebut adalah dimana mereka yang tidak tahun mengenai harga bahan pangan di pasar akan mengalami kesulitan.

Dari fakta tersebut maka Pemerintah Kota Bandung membuat sebuah aplikasi yang dinamakan Arimbi.

Gambar 4.5 Tampilan fitur Arimbi ⁶⁹



Daftar Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat (Kepokmas) Kota Bandung

Data kebutuhan pokok masyarakat yang ditampilkan adalah harga rata-rata dari harga yang terdapat di beberapa pasar yang dikelola oleh PD. Pasar Bermartabat Kota Bandung.

keterangan: Naik Turun Stabi

*Keterangan naik turunnya harga berdasarkan perbandingan harga rata-rata (Minggu, 11/09/2022 s/d Senin, 19/09/2022) dengan harga terakhir (Selasa, 20/09/2022)

Nama Komoditas	Minggu, 11/09/2022	Senin, 12/09/2022	Selasa, 13/09/2022	Rabu, 14/09/2022	Kamis, 15/09/2022	Jumat, 16/09/2022	Sabtu, 17/09/2022	Minggu, 18/09/2022	Senin, 19/09/2022	Selasa, 20/09/2022
Bawang Merah (1 Kg)	Rp40000	Rp40000	Rp40000	Rp40000	Rp40000	Rp40000	Rp40000	Rp40000	Rp36000	Rp36000
Bawang Putih (1 Kg)	Rp30000	Rp30000	Rp30000	Rp30000	Rp30000	Rp30000	Rp30000	Rp30000	Rp26000	Rp26000
Beras Medium (1 Kg)	Rp11000	Rp11000	Rp11000	Rp11000	Rp11000	Rp11000	Rp11000	Rp11000	Rp11000	Rp11000
Beras Premium (1 Kg)	Rp12000	Rp12000	Rp12000	Rp12000	Rp12000	Rp12000	Rp12000	Rp12000	Rp12000	Rp12000
Cabai Keriting (1 Kg)	Rp85000	Rp85000	Rp85000	Rp85000	Rp85000	Rp85000	Rp85000	Rp80000	Rp80000	Rp80000
Cabai Merah (1 Kg)	Rp80000	Rp80000	Rp80000	Rp80000	Rp80000	Rp80000	Rp80000	Rp80000	Rp80000	Rp80000

Sumber: Website resmi *Bandung Smart City*

Arimbi dapat diakses melalui aplikasi di playstore dan juga website resmi Bandung Smart City pada fitur Harga pangan. Aplikasi Arimbi ini berisi tabel harga dari berbagai komoditas pangan yang mana update harga pasar setiap harinya dapat diketahui. Dalam SDGs program ini dapat masuk sebagai perwujudan dari agenda nomor 11 adalah kota dan komunitas yang berkelanjutan, dimana melalui aplikasi Arimbi ini maka dapat dilihat bahwa untuk mempermudah masyarakat dalam melihat harga pasar.

Selain mengimplementasikan kebijakan dan kerangka kerja yang ada dalam MUFPP, Kota Bandung sebagai salah satu kota yang bergabung dalam MUFPP juga wajib untuk ikut berpartisipasi dalam pameran praktik agenda tahunan MUFPP Pact Talk. MUFPP setiap tahunnya menggelar

⁶⁹ Pemerintah Kota Bandung, 'Aplikasi Arimbi' <<http://data.bandung.go.id/arimbi/#/kepokmas/pdpasar>> [accessed 26 September 2022].

acara tahunan yang diselenggarakan untuk merangsang pertukaran praktik dan pembelajaran antara kota-kota penandatangan. Salah satu tujuan terpenting dari Pakta Kebijakan Pangan Perkotaan Milan (MUFPP), adalah Untuk mendorong kerjasama ini sejak tahun 2016, Kota Milan dan Yayasan Cariplo meluncurkan *Milan Pact Awards* (MPA) untuk mengakui upaya paling kreatif dan memantau kota mana yang mengimplementasikan komitmen yang telah mereka buat ketika mereka bergabung dalam pakta tersebut. Penghargaan tersebut merupakan sarana untuk mendorong aksi, memfasilitasi munculnya praktik terbaik kota MUFPP, menjadikannya nyata bagi masyarakat dengan fungsi menginspirasi aksi kota penandatangan lainnya.⁷⁰

MUFPP pada tahun 2020 membuat edisi khusus *Milan Pact Awards* yaitu "*Milan Pact Talks*". Edisi baru ini dibuat dikarenakan pandemi Covid-19 yang membuat terjadinya batasan untuk membuat acara yang memuat banyak orang sehingga dibuatlah *Milan Pact Talk* dengan mengirimkan 4 video sehubungan dengan tanggapan sistem pangan saat Covid-19. Setelah itu dibuatlah forum dalam mempresentasikan pengembangan pangan dari masing-masing anggota MUFPP. Tujuannya adalah untuk berbagi pengetahuan tentang langkah-langkah yang dilakukan untuk menjawab, mengadaptasi, dan mengurangi guncangan sistem pangan.

Tabel 4.2 Video praktek pengembangan sistem pangan di Kota Bandung

NO.	JUDUL VIDEO	ISI VIDEO
-----	-------------	-----------

⁷⁰ 'The Milan Pact - Milan Urban Food Policy Pact' <<https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/the-milan-pact/>> [accessed 28 August 2022].

1.	Buruan SAE ⁷¹	Video Buruan SAE berisi tentang sistem urban farming yang memanfaatkan pekarangan atau halaman yang kosong. Program ini dimaksud untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kota Bandung. Buruan SAE terdiri dari beberapa sektor antara lain, ikan, kompos, pembibitan tanaman, sayuran, ternak dan tanaman obat. <i>Tagline</i> dari Buruan SAE sendiri adalah Sehat, Alami dan Ekonomis. Program ini sendiri bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana memproduksi pangan sendiri. Keuntungan dari program ini sendiri adalah, yang pertama adalah kesadaran makanan sehat, kedua potensi pasar, dimana masyarakat dapat meningkatkan potensi pasar, ketiga adalah Pendidikan pertanian dan ekowisata, jika banyak masyarakat yang mengimplementasikan program ini mereka dapat mendapatkan pemahaman mengenai pertanian dan ekowisata. dan terakhir adalah dapat menghadirkan kegiatan yang positif dan menarik dari kepedulian terhadap tanaman secara langsung.
2.	Badami ⁷²	Video Badami ini menjelaskan tentang program <i>food rescue</i> dimana program ini bertujuan untuk memberi makan pada orang yang membutuhkan atau sering disebut <i>food sharing</i> . Sistem dari food sharing ini adalah dengan mendeliverikan makanan pada orang yang membutuhkan atau juga dapat dilakukan dengan mendonasikan berupa uang dan selain itu juga dapat dengan melakukan pembelian pada produk UMKM lokal. Tujuan dari program ini adalah agar tidak ada orang yang mengalami kekurangan pangan dan kelaparan.
3.	Arimbi ⁷³	Kota Bandung adalah kota metropolitan yang mana nasi adalah makanan yang disukai oleh masyarakat. Terdapat 91 kg nasi yang dikonsumsi perorangan di Kota Bandung. Di Kota Bandung karyawan yang memiliki penghasilan menengah

⁷¹ MUFPP, *Buruan SAE Bandung*, 2020 <https://youtu.be/Qnoz8Ym_GuQ>.

⁷² MUFPP, *Badami*, 2020 <<https://youtu.be/qFCaLcJVpw>>.

⁷³ MUFPP, 'Arimbi', 2022 <<https://youtu.be/ihitEFn5tw>>.

		<p>sekitar 5 juta per bulan memiliki gaya hidup yang mahal dan terbilang boros. Namun pada saat wabah pandemi Covid-19 hampir dari semua kalangan masyarakat terkena dampak dari segi ekonomi. Hal ini membuat masyarakat perlu untuk memiliki gaya yang lebih ekonomis. Orang – orang Dengan kebiasaan konsumtif yang mahal kemudian kurang pengetahuan mengenai harga pasar sedangkan masyarakat perlu untuk memilih sebelum membeli dan pergi ke pasar. Arimbi merupakan aplikasi yang dapat membantu masyarakat dalam melihat harga pasar. Fitur-fitur aplikasi yang ditawarkan antara lain, harga bahan makanan, ketersediaan tempat tidur rumah sakit dan cctv di jalan. Dimana aplikasi ini lebih update dalam memberikan informasi harga di pasar dan juga akan ada notifikasi jika terjadi perubahan harga.</p>
4.	Kang Pisman (Kurang, Pisahkan, Manfaatkan) ⁷⁴	<p>Sampah organik yang terus dihasilkan seiring dengan kebutuhan masyarakat. Membuat Kota Bandung setiap harinya menghasilkan 1.601ton sampah makanan perharinya. Kota Bandung kemudian membuat Program yang di sebut Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan), program ini sesuai dengan konsep 3R yaitu, <i>Reduce, Reuse</i> dan <i>Recycle</i>. Keistimewaan dari program ini antara lain, yang pertama Gerakan ini bersifat masif dan dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat. Kedua masyarakat dapat mengolah sampahnya secara mandiri. Dengan metode yang dipilih sendiri dan disesuaikan dengan sumber sampah, sarana dan pengetahuan yang dimiliki masing-masing masyarakat. Pengelolaan sampah ini dengan melibatkan masyarakat dalam memisahkan sampah sebelum di proses dan diintegrasikan pada pertanian. Maka pengolahan sisa makanan dapat bermanfaat.</p>

Sumber: Akun Youtube Resmi MUFPP

⁷⁴ MUFPP, 'Bandung Waste to Food', 2020 <<https://youtu.be/bTUvw5Wp8KU>>.

Kota Bandung sendiri mengirimkan 4 video pengembangan sistem pangan. Video itu antara lain Buruan SAE, Badami, Arimbi, dan Kang pisman. Keadaan pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa kota-kota berada di garda terdepan dalam memberikan solusi konkrit terhadap kebutuhan warga. Secara khusus, tim kebijakan pangan harus menghadapi banyak tantangan mendesak yang tak terduga karena sistem pangan perkotaan telah sangat terpuak oleh guncangan eksternal ini. Dari 4 video yang dikirim Badami merupakan program yang sangat berkaitan dengan situasi Covid-19 pada saat itu dimana Badami adalah Program Food Sharing dimana masyarakat dapat memberikan donasi untuk memberikan makan pada masyarakat yang kurang mampu dan sangat terkena dampak dari pandemi.

Pada tahun 2021 Kota Bandung terpilih menjadi *Steering Committee* MUFPP memiliki tugas untuk mengkoordinir kota yang bergabung dalam MUFPP di wilayah tersebut. Dalam rancangan agenda MUFPP 2021-2023, Kota Bandung sebagai salah satu anggota MUFPP di Asia Pasifik dimana terdapat tujuan agenda yang salah satunya adalah menyelenggarakan dua forum regional online pada tahun 2022 dan 2023. Selain itu, 4 webinar akan diadakan dua kali setahun, 2 diselenggarakan oleh masing-masing perwakilan Komite Pengarah.⁷⁵

Kota Bandung sendiri telah menyelenggarakan Agenda forum regional yang dilaksanakan pada tanggal 03 - 04 agustus 2022 dengan tema "*Improving City Food Security and Creating Work Through Urban Farming Based on Culture and Technology*" acara ini terdiri dari dua kegiatan yaitu konferensi internasional pada Hari pertama, acara ini berlangsung di kampus

⁷⁵ Milan Urban and Food Policy, 'Milan Urban Food Policy Pact Regionalisation Process ACTION PLAN 2021-23', 2021.

Universitas Katolik Parahyangan dan juga ada yang melalui online via zoom bagi yang berada diluar kota.⁷⁶ Terdapat beberapa kota yang tertarik bergabung dalam MUFPP saat acara forum regional tersebut antara lain, Kabupaten Gorontalo, Kota Tarakan, Kota Banjarbaru, Kota Makassar, Kota Bontang, dan Kota Seberang Perai, Malaysia. Sebelumnya Kota Bandung juga telah berhasil mengajak kota lain untuk bergabung dalam MUPP seperti Kota Semarang, Kota Pekanbaru, Kota Sukabumi.

Gambar 4.6 Acara forum regional di Kota Bandung⁷⁷



Sumber: Website resmi Milan Urban Food Policy Pact

Pada hari kedua tanggal 4 Agustus 2022 agenda yang dilakukan adalah kunjungan lapangan. Para peserta dari acara ini dibawa untuk berkunjung ke beberapa spot atau titik dari Buruan SAE. Buruan SAE Kota

⁷⁶ '1st MUFPP Asia Pacific Regional Forum - Milan Urban Food Policy Pact' <<https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/1st-mufpp-asia-pacific-regional-forum/>> [accessed 28 August 2022].

⁷⁷ '1st MUFPP Asia Pacific Regional Forum - Milan Urban Food Policy Pact'.

Bandung setelah agenda ini banyak diapresiasi oleh masyarakat dan pihak internasional karena dapat memanfaatkan halaman rumah menjadi ketahanan pangan.⁷⁸ Hasil dari kunjungan ini pun membuat 7 kota yang hadir pada saat kunjungan ini menjadi bagian dalam MUFPP dengan penandatanganan Pakta Milan. Acara ini bertujuan untuk mengatasi masalah ketimpangan pada akses ke pangan dan mendesak kota-kota untuk membuat sebuah sistem pangan yang lebih berkelanjutan untuk memastikan ketahanan pangan yang dan juga peluang ekonomi yang lebih baik.

Implementasi MUFPP dalam pengembangan sistem pangan berkelanjutan di Kota Bandung Berjalan dengan sangat lancar, pada tahun 2020 saat *Milan Pact Talks* Kota Bandung mengirim 4 praktik pengembangan sistem pangan yang mana Buruan SAE Kota Bandung dianggap sebagai praktik terbaik dalam *food supply* and Distribution. Buruan SAE memang telah dirancang sebelum Kota Bandung Bergabung dalam MUFPP namun setelah bergabung dalam MUFPP Kota Bandung diberikan saran dan masukan mengenai praktik Buruan SAE ini untuk kedepannya dapat lebih dikembangkan dengan membuat pembagian variasi penghasil jenis pangan di setiap titik tempat Buruan SAE. Maka dapat disimpulkan bahwa Kota Bandung dalam pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan melalui hubungan luar negeri atau paradiplomasi dapat memberikan opsi dalam langkah pengembangan sistem pangannya.

Negara sebagai penanggung jawab yang wajib untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakatnya memberikan madat dan

⁷⁸ Humas Kota Bandung, 'Buruan Sae Kota Bandung Akan Di Sebarluaskan Di Kancan Internasional', *Bandung.Co.Id*, 2022 <<https://www.bandung.go.id/news/read/6794/buruan-sae-kota-bandung-akan-di-sebarluaskan-di-kancah-internasional>> [accessed 31 August 2022].

kebebasan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dianggap perlu melalui keterlibatan aktor *sub-state*, dalam hal ini secara langsung tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Otonom Untuk Melaksanakan Kegiatan di Bidang Kerja Sama Internasional mengatur dalam Pasal 42 (1) bahwa DPRD berkewajiban dan berhak menyetujui rencana kerja sama internasional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Klarifikasi pasal tersebut juga menyebutkan bahwa selain *sister city/sister province*, pemerintah daerah juga dapat mengadakan perjanjian kerjasama teknis yang mengatur pemberian bantuan kemanusiaan, kerjasama dalam pemberian pinjaman/hibah, kerjasama dalam penyertaan modal dan lain-lain. Maka legalitas aktor *sub-state* dalam hal ini Kota Bandung yang menjadi aktor dalam sebuah Rezim internasional. Hal ini menurut penulis sendiri lebih dapat mempermudah sebuah negara untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan mudah, dikarenakan para pemerintah daerah lebih tahu dan paham mengenai kondisi sebenarnya yang dialami dan apa yang diperlukan untuk di kembangkan dalam sebuah daerah.

MUFPP sebagai sebuah Rezim Internasional dapat dievaluasi berdasarkan teori efektivitas rezim Arild Underdal, dengan melihat terlebih dahulu *Output* dari sebuah rezim, dimana MUFPP yang pada tahun 2015 melahirkan sebuah kebijakan dan kerangka kerja yang dapat menjadi pilihan bagi setiap anggotanya dalam langkah pengembangan sistem pangan. Sementara *Outcome* dari MUFPP bagi Kota Bandung terlihat pada 3 kategori kebijakan dan 12 poin kerangka kerja atau rekomendasi aksi yang telah di implementasi oleh Kota Bandung. *Impact* nya dapat dilihat dari bagaimana setiap implementasi MUFPP yang dilakukan oleh Kota Bandung dapat

memberikan manfaat bagi Kota Bandung. Terbukti pada bagaimana kemudian terbentuk beberapa program yang bermanfaat dan juga 2 aplikasi yang telah dirilis dan memberikan dampak yang baik pada masyarakat Kota Bandung.

MUFPP termasuk dalam variabel independent *Problem Solving Capacity* (penyelesaian masalah). *Problem solving capacity* yaitu untuk memecahkan masalah adalah solusi dari masalah yang terkait dengan efektivitas rezim. Berdasarkan tiga indikator keterampilan, *problem solving capacity* yaitu struktur kelembagaan, distribusi kekuasaan, keterampilan dan energi. Kerangka kelembagaan karenanya memuat aturan-aturan rezim, hal ini dapat dilihat pada kebijakan dan kerangka kerja yang ada dalam MUFPP. Distribusi kekuasaan, di mana rezim memiliki distribusi kekuasaan yang adil. MUFPP memiliki pemerintahan MUFPP, dengan Kota Bandung sendiri sebagai *Steering Committee*.

Namun dari sekian kerangka kerja dari MUFPP yang diimplementasikan oleh Kota Bandung, penulis mendapatkan adanya beberapa kekurangan dalam penerapan rekomendasi, melihat pada permasalahan pangan di Kota Bandung dan tujuan dari Kota Bandung itu sendiri dalam mewujudkan pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan maka terdapat beberapa poin yang relevan untuk diwujudkan dari point - poin kerangka kerja yang telah dijabarkan di atas.

Meskipun Kota Bandung telah memiliki program Kang pisman dalam upaya penanganannya. Namun masih kurang maksimal, Tindakan yang dapat diadopsi dalam menangani permasalahan ini terdapat pada kategori kebijakan sampah makanan, rekomendasi aksi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Rekomendasi aksi No.34, Membuat perkumpulan ahli sistem pangan untuk menilai dan memantau hilangnya makanan dan pengurangan limbah. Melalui aksi ini Kota Bandung dapat menganalisis dan memantau limbah pangan yang dihasilkan di berbagai sektor dengan ahli sistem pangan, sehingga data yang dihasilkan dapat menemukan solusi dalam pengurangan limbah pangan. sehingga program Kang Pisman yang dibuat oleh Kota Bandung dapat lebih efektif untuk dilaksanakan dan tidak hanya sekedar program yang tidak digunakan oleh masyarakat.

Ketersediaan pangan terbilang sedikit, sekitar 2,5 juta penduduk Kota Bandung saat ini kebutuhan pangannya bergantung dengan suplay dari luar daerah.⁷⁹ Salah satu faktornya adalah terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, pabrik dan mall. selain itu peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya di Kota Bandung dikarenakan proses urbanisasi yang terjadi membuat kebutuhan akan pangan di kota tersebut juga meningkat. maka dari permasalahan tersebut Kota Bandung berupaya untuk membangun sistem pangan yang berkelanjutan, untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan pasokan pangan di Kota Bandung di masa depan. Tindakan yang dapat diadopsi Kota Bandung sebagai anggota MUFPP untuk pengembangan sistem pangan dapat diadopsi dalam Kebijakan tata kelola dan produksi makanan dalam MUFPP berikut aksi yang dapat di adopsi, antara lain sebagai berikut:

⁷⁹ Ayi Kusmawan, '96% Kebutuhan Pangan Warga Kota Bandung Dipasok Luar Kota – Dara.Co.Id', *Dara.Co.Id*, 2019 <<https://www.dara.co.id/96-kebutuhan-pangan-warga-kota-bandung-dipasok-luar-kota.html>> [accessed 28 August 2022].

1. Rekomendasi aksi no.1, Memfasilitasi kolaborasi antar lembaga dan departemen kota dan mencari keselarasan kebijakan dan program yang berdampak pada sistem pangan di berbagai sektor dan tingkat administrasi, mengadopsi dan mengarusutamakan pendekatan berbasis hak; opsi dapat mencakup dedikasi staf kota permanen, peninjauan tugas dan prosedur dan relokasi sumber daya. Tindakan ini perlu untuk di adopsi oleh Kota Bandung dikarenakan perlu adanya kolaborasi antara lembaga atau para pemangku kepentingan dalam mencari keselarasan kebijakan dan program dalam sistem pengembang panga yang lebih berkelanjutan. Seperti kolaborasi antara lembaga Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung dengan para Pemerintahan di beberapa desa maupun perkotaan dalam menyelaraskan atau membuat program yang dapat saling bekerjasama untuk membuat sistem pangan yang berkelanjutan.
2. Rekomendasi aksi no.2 Meningkatkan partisipasi pemegang kepentingan di tingkat kota melalui dialog politik, dan penunjukan penasihat kebijakan pangan dan/atau pengembangan platform multi-pemegang kepentingan atau dewan pangan, serta melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran. Hal ini juga perlu untuk di adopsi oleh Kota Bandung dikarenakan perlu adanya keselarasan persepsi dalam pengembangan sistem pangan maka dari itu Pemerintah Kota Bandung perlu membuka dialog demi mengetahui kebijakan dan langkah yang terbaik dalam pembangan sistem pangan di kota tersebut. penulis mendapati fakta baru saat mengikuti acara forum regional Kota Bandung pada tanggal 3 saat sesi dialog dimana terdapat perbedaan persepsi dalam penanganan atau upaya dalam penanggulangan

pangan di Kota Badung. Seperti perbedaan persepsi mengenai kurangnya pangan terjadi dikarenakan berkurangnya jumlah para petani yang mana alasan yang mendasar dikarenakan banyak anak petani yang tidak ingin melanjutkan pekerjaan orang tuanya yaitu menjadi petani. Menurut penulis sendiri hal ini kurang baik untuk diterapkan jika anak petani harus mengikuti atau di paksa untuk mengikuti pekerjaan orang tuanya penulis rasa itu melanggar hak dan kebebasan seseorang untuk memilih. Menurut penulis metode yang baik untuk permasalahan ini adalah dengan memberikan beasiswa pertanian untuk anak pedesaan yang ingin melanjutkan usaha orang tuanya agar desa tersebut dapat membawa metode pertanian yang baru.

3. Rekomendasi aksi no.3, Mengidentifikasi, memetakan dan mengevaluasi inisiatif lokal dan gerakan pangan masyarakat sipil untuk mengubah praktik terbaik menjadi program dan kebijakan yang relevan, dengan dukungan penelitian lokal atau lembaga akademis. Perlunya pemetaan, mengidentifikasi dan mengevaluasi gerakan pangan masyarakat sipil, Pemerintah Kota Bandung dapat mengetahui praktik atau program dan kebijakan yang relevan untuk pengembangan sistem pangan di kota tersebut. Misalnya dengan membuat program yang sesuai pada beberapa daerah sehingga dapat menghasilkan pangan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.
4. Rekomendasi No.39, Mencari koherensi antara kota dan produksi pangan pedesaan terdekat, pengolahan dan distribusi, berfokus pada produsen petani kecil dan keluarga petani, memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan perempuan dan pemuda. Tindakan ini

dapat diadopsi untuk mensupport produksi pangan kota dan pedesaan sehingga korelasi antar keduanya dapat seimbang.

Bergabung dalam MUFPP ini kemudian dapat memberikan opsi tindakan dalam pengembangan sistem pangan bagi Kota Bandung melalui Kebijakan dan Kerangka Kerja yang telah direkomendasikan. Pengembangan Sistem pangan di Kota Bandung dengan melakukan kerjasama luar negeri dengan tujuan untuk mencapai kepentingan regionalnya.

Namun perlu diperhatikan bahwa praktik-praktik yang dibuat oleh anggota yang bergabung dalam MUFPP bukan lah bentuk persaingan tentang Kota mana yang menghasilkan praktik terbaik tetapi merupakan aksi bersama dalam pengembangansistem pangaan yang nantinya dapat dibagikan kepada kota lain dan dapat ditiru jika dianggap sesuai dengan kondisi dan permasalahan pangan di kota tersebut. Dari kerangka kerja dan kebijakan MUFPP yang telah dijabarkan. Kota Bandung sebagai anggota dalam MUFPP telah berkomitmen untuk mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan diharapkan dapat berhasil dalam pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan.

Pencapaian yang sangat memuaskan yang diperoleh Kota Bandung semenjak bergabung dalam MUFPP antara lain, Suksesnya Program Buruan SAE yang menyita banyak perhatian negara anggota lain untuk di adopsi dan pengakuan dari MUFPP bahwa Buruan SAE menjadi praktik terbaik dalam kategori *food supply and distribution*. Selain itu Kota Bandung setelah bergabung dalam MUFPP sejak tahun 2020 mendapat mandat untuk menjadi Steering Committee di MUFPP Asia Pasifik. Maka Kota Bandung memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan kota-

kota lain mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan di wilayah Asia Pasifik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Globalisasi bersamaan dengan proses urbanisasi yang terjadi di daerah perkotaan membuat semakin meningkatnya jumlah penduduk di daerah perkotaan. Proses urbanisasi yang terjadi mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi mall, perumahan, dan pabrik, yang mengakibatkan kurangnya lahan produksi pangan. Selain itu juga sikap ketidakpedulian masyarakat akan sampah makanan, dimana banyak sampah makanan yang terbuang, menunjukkan bahwa masyarakat belum dapat menghargai pangan dengan baik.

Sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, Kota Bandung masih bergantung pada suplai pangan dari luar daerah lain, menunjukkan bahwa Kota Bandung perlu untuk mengembangkan sistem pangan berkelanjutan agar dapat lebih mandiri dalam penyediaan pangan terhadap masyarakatnya. Maka dari itu Kota Bandung berupaya untuk mengembangkan sistem pangan berkelanjutan dengan bergabung dalam pakta perjanjian MUFPP. Langkah yang diambil Kota Bandung ini merupakan fenomena Paradiplomasi dimana Kota Bandung sebagai aktor sub-state yang melakukan kerjasama luar negeri. MUFPP merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengembangkan sistem pangan berkelanjutan. Para anggota yang bergabung dalam MUFPP berkomitmen untuk mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan dan membangun praktik pangan terbaik bagi kota mereka. Sebagai sebuah Rezim Internasional MUFPP sendiri memberikan beberapa pilihan Kebijakan dan Kerangka Kerja yang mana setiap kota yang bergabung dalam MUFPP

dapat memilih rekomendasi aksi yang mana yang sesuai dengan kondisi dan permasalahan pangan bagi masing-masing kota.

Kota Bandung sendiri telah mengimplementasikan beberapa Kerangka kerja atau rekomendasi aksi dari MUFPP. Hingga saat ini Kota Bandung telah mengimplementasikan kebijakan dan rekomendasi aksi dari MUFPP. Meskipun dalam pengimplementasiannya terdapat satu program yang dilakukan Kota Bandung yang dirasa masih kurang efektif dalam pelaksanaannya. Maka terdapat beberapa poin rekomendasi yang menurut penulis perlu atau lebih tepat untuk dijalankan dan dioptimalkan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan di Kota Bandung.

5.2 Saran

Setelah masuk dalam MUFPP Kota Bandung terus berupaya dalam mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan dengan mengadopsi beberapa aksi dalam implementasinya. Dalam pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan maka Kota Bandung perlu untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan program yang sudah ada, terutama pada program yang masih kurang maksimal seperti program Kang Pisman. Selain itu Kota Bandung yang telah menjabat menjadi Steering Committee MUFPP di Asia Pasifik memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan Kota-kota yang bergabung dalam MUFPP di Asia Pasifik dalam mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan.

Kota - kota di Indonesia sendiri yang telah bergabung dalam MUFPP, Dalam hal ini perlu untuk saling membantu dalam mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan dan nantinya dapat menjadi inspirasi bagi

daerah lain, sehingga diharapkan nantinya Indonesia akan menjadi negara yang berhasil dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat. Maka Kota Bandung sebagai *Steering Committee* MUFPP di Asia Pasifik kiranya dapat membantu kota - kota lain dalam pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan contohnya seperti pengembangan sistem pangan *urban farming*, dan juga penanganan masalah sampah makanan. Diharapkan nantinya Indonesia dalam pengembangan sistem pangan dapat menopang permintaan pangan masyarakat melalui persatuan para kota yang bergabung dalam MUFPP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Elektronik :

- 'Buku LII Masterplan BSC', *Bandung Smart City*, 2020
<<https://smartcity.bandung.go.id/ebook/130>> [accessed 18 October 2021]
- Calori, Andrea, Francesca La Rocca, and Bianca Minotti, *Empowering Urban Youth for Food and Climate Action* (Milan: ShareAlike 4.0 International License, 2022)
- Mukti, Takdir, *Paradiplomacy Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, 2013
- Mukti Takdir, *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia* (Yogyakarta : The Phinisi Press Yogyakarta, 2013)
- Scavuzzo, Anna, *Empowering Urban Youth for Food and Climate Action*, 2022
- Yollanda, L., 'WTO Menghegemoni Kebijakan Ketahanan Pangan Di Indonesiamelalui Agreement on Agriculture', *Satu, Buku Kelembagaan, Dasawarsa Pangan, Ketahanan Indonesia, Kementerian Pertanian*, 2016, 1

Dokumen resmi :

- Kota Bandung, and Milan Urban Food Policy Pact, *MoU* (Bandung, 2022)

Jurnal & Arikel :

- '1st MUFPP Asia Pacific Regional Forum - Milan Urban Food Policy Pact'
<<https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/1st-mufpp-asia-pacific-regional-forum/>> [accessed 28 August 2022]
- Abdul fahmi, rifki, 'DPRD Kota Bandung Soroti Program Kang Pisman Yang Masih Kurang Partisipasi Dari Masyarakat - PRFM News', *Prfnews.Id*, 2021
<<https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/bandung-raja/pr-132641446/dprd-kota-bandung-soroti-program-kang-pisman-yang-masih-kurang-partisipasi-dari-masyarakat>> [accessed 28 August 2022]
- 'Apa Itu SDGs' <<https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu>> [accessed 11 January 2022]
- 'DELAPAN KELURAHAN JADI ROLE MODEL KAWASAN BEBAS SAMPAH – Kang Pisman', *Kangpisman.Com* <<https://www.kangpisman.com/delapan-kelurahan-jadi-role-model-kawasan-bebas-sampah/>> [accessed 3 September 2022].
- Asfar, A.M.Irfan Tufan, 'Analisis Naratif, Analisis Konten, Dan Analisis Semiotik (Penelitian Kualitatif)', 2019
- Bandiyono, Suko, and Ken. F Indrawardani, 'Tinjauan Migrasi Penduduk Desa-Kota, Urbanisasi Dan Dampaknya', *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 2010, 14

- Erika, Luluk, 'Efektivitas Rezim Kerjasama Sister City Antara Pemerintah Kota Surabaya Dengan Pemerintah Kota Guangzhou', 2 (2019), 89
- Faruk Syaibani, Ahmad, 'Kurangi Sampah 2,5 Ton,Warga Di Dago Bengkok Ini Kompak Terapkan Kang Pisman - PRFM News - Halaman 2', *Prmnews.Id*, 2022 <<https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-135001720/kurangi-sampah-25-tonwarga-di-dago-bengkok-ini-kompak-terapkan-kang-pisman?page=2>> [accessed 28 August 2022]
- Humas Kota Bandung, 'Buruan Sae Kota Bandung Akan Di Sebarluaskan Di Kancah Internasional', *Bandung.Co.Id*, 2022 <<https://www.bandung.go.id/news/read/6794/buruan-sae-kota-bandung-akan-di-sebarluaskan-di-kancah-internasional>> [accessed 31 August 2022]
- 'Kota Bandung Miliki 335 Buruan SAE ', *Golali.Id*, 2022 <<https://golali.id/kota-bandung-miliki-335-buruan-sae/>> [accessed 3 September 2022]
- Kusmawan, Ayi, '96% Kebutuhan Pangan Warga Kota Bandung Dipasok Luar Kota – Dara.Co.Id', *Dara.Co.Id*, 2019 <<https://www.dara.co.id/96-kebutuhan-pangan-warga-kota-bandung-dipasok-luar-kota.html>> [accessed 28 August 2022]
- Mansyur, Alia Rizka, 'Paradiplomasi Melalui Kerjasama Sistercity: Upaya Untuk Meningkatkan Potensi Industri Pariwisata Di Kabupaten Sumenep', 16 (2021), 3
- Martin, M, 'Rezim Internasional', *Academiedu.Com*, 2017
- Noveria, Mita, 'Fenomena Urbanisasi Dan Kebijakan Penyediaan Perumahan Dan Permukiman Di Perkotaan Indonesia', *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 36.2 (2010), 103–24 <<http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jmi/article/view/643>>
- Nur Aeni, Siti, 'Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor, Dan Contohnya - Lifestyle Katadata.Co.Id', *Datadata.Co.Id*, 2022 <<https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya>> [accessed 27 August 2022]
- Pautan daulay, Yusri, 'Pelaksanaan Paradiplomasi Pemerintahan Kota Medan Dalam Kerjasama Sister City Kota Dengan Kota Gwangju Dan Ichikawa', 2019
- Ragam, '234 Titik Buruan SAE Tersebar Di Seluruh Kelurahan Di Kota Bandung', *Berita Inspiratif*, 2021 <<https://www.beritainspiratif.com/read/64254/234-titik-buruan-sae-tersebar-di-seluruh-kelurahan-di-kota-bandung>> [accessed 3 September 2022]
- Rahma, Imelda, 'Implementasi Adalah Tindakan Merealisasikan Rencana, Ketahui Pengertian Dan Contohnya - Lifestyle Fimela.Com', *Fimela*, 2021 <<https://www.fimela.com/lifestyle/read/4531029/implementasi-adalah-tindakan-merealisasikan-rencana-ketahui-pengertian-dan-contohnya>> [accessed 27 August 2022]
- Rahmadan ZB, 'Program Kota Bandung Buruan Sae Menginspirasi Dunia Internasional Di Konferensi U-20 - Zona Bandung', *Zona Bandung.Com*, 2022 <<https://www.zonabandung.com/bandung-raya/pr-1204067532/program-kota-bandung-buruan-sae-menginspirasi-dunia-internasional-di-konferensi->

u-20?page=1> [accessed 31 August 2022]

Sembiring, Putri Anne Br, and Matius Bangun, 'Analisis Kebijakan Pengendalian Urbanisasi Kota Berastagi Kabupaten Karo Sumut', *Jurnal Darma Agung*, 29.2 (2021), 79 <<https://doi.org/10.46930/ojsuda.v29i2.935>>

Sekarkinanti, Dewa Ayu Rachmitha, 'Analisis Pembentukan Rezim Internasional Terhadap Eu-Turkey Refugee Agreement', 2020

'Setiap Tahun, Lahan Sawah Di Kota Bandung Berkurang', *Pindainews.Com*, 2091 <<https://www.pindainews.com/berita/5067/setiap-tahun-lahan-sawah-di-kota-bandung-berkurang>> [accessed 27 August 2022]

SM, Tiah, 'Buruan SAE DKPP Kota Bandung Raih Penghargaan Nasional Dan Internasional, Makin Terasa Manfaatnya - Halaman 2 - Tribunjabar.Id', *TribunJabar.Id*, 2021 <<https://jabar.tribunnews.com/2021/11/18/buruan-sae-dkpp-kota-bandung-raih-penghargaan-nasional-dan-internasional-makin-terasa-manfaatnya?page=2>> [accessed 28 August 2022]

Suyud, Widyoseno, '5 Kota Dengan Konsep Smart City Terbaik Di Dunia', 2018 <<https://inixindojogja.co.id/5-kota-dengan-konsep-smart-city-terbaik-di-dunia/?amp>> [accessed 11 January 2022]

Thabrani, Gamal, 'Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam - Serupa.Id', *Serupa.Id*, 2021 <<https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>> [accessed 11 June 2022]

'UU 18 Tahun 2012 Tentang Pangan', *Jagloabang*, 2020 <<https://www.jagloabang.com/pustaka/uu-18-2012-pangan>> [accessed 11 June 2022]

Widiana, Fany, and Ario Bimo Utomo, 'Menuju Surabaya Green City Melalui Kerjasama Kota Kembar Surabaya-Kitakyushu', 8.1 (2021)

Widianarko, Budi, 'Pakta Milan, Kota, Limbah Pangan | Portal Berita Unika Soegijapranata', 2019 <<https://news.unika.ac.id/2019/07/pakta-milan-kota-limbah-pangan/>> [accessed 27 August 2022]

Wulan, 'Gelar Konferensi Urban Farming Internasional, Kota Bandung Fokus Pada Sistem Pangan Berkelanjutan - Harmonionline.Net', *Harmonionline.Net*, 2022 <<https://harmonionline.net/2022/08/02/gelar-konferensi-urban-farming-internasional-kota-bandung-fokus-pada-sistem-pangan-berkelanjutan/>> [accessed 27 August 2022]

Yuda, Alfi, 'Pengertian Urbanisasi Menurut Para Ahli, Faktor Penyebab, Tujuan, Dan Dampak Yang Terjadi - Ragam Bola.Com', *Bola.Com*, 2021 <<https://www.bola.com/ragam/read/4733374/pengertian-urbanisasi-menurut-para-ahli-faktor-penyebab-tujuan-dan-dampak-yang-terjadi>> [accessed 26 September 2022]

Wawancara :

Permana, Agus, *Wawancara Tidak Terstruktur Dengan Staf Evaluasi, Administrasi Dan Dokumentasi*, 2021

Dhea, 'Wawancara Tidak Terstruktur Dengan Staf Bagian Kerjasama Luar Negeri Kota Bandung', 2022

Website :

'About Milan Urban Food Policy Pact', *Milan Urban Food Policy Pact*, 2022 <<https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/>> [accessed 7 October 2022]

'Apa Itu SDGs' <<https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu>> [accessed 11 January 2022]

'Buruan SAE', *Buruan SAE* <<https://buruansae.bandung.go.id/index.php/category/artikel/>> [accessed 31 August 2022]

'Badan Pusat Statistik Kota Bandung', 2020 <<https://bandungkota.bps.go.id/indicator/12/32/1/jumlah-penduduk.html>> [accessed 11 January 2022]

———, 2021 <<https://bandungkota.bps.go.id/pressrelease/2021/01/06/871/profil-kemiskinan-di-kota-bandung-maret-2020.html>> [accessed 28 January 2022]

'Bandung Food Smart City' <<https://bandungfoodsmartcity.org/about-us-2/>> [accessed 11 January 2022]

'DELAPAN KELURAHAN JADI ROLE MODEL KAWASAN BEBAS SAMPAH – Kang Pisman', *Kangpisman.Com* <<https://www.kangpisman.com/delapan-kelurahan-jadi-role-model-kawasan-bebas-sampah/>> [accessed 3 September 2022]

'Komposisi Sampah', *SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional* <<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/public/data/komposisi>> [accessed 31 August 2022]

'Milan Urban Food Policy Pact', 2022 <<https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/>> [accessed 27 August 2022]

'MOU MUFPP', 2015 <<https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/#>> [accessed 29 January 2022]

MUFPP, 'Arimbi', 2022 <<https://youtu.be/ihitEFn5tw>>

———, *Badami*, 2020 <<https://youtu.be/qFCaLcJVpw>>

———, 'Bandung Waste to Food', 2020 <<https://youtu.be/bTUvw5Wp8KU>>

———, *Buruan SAE Bandung*, 2020 <https://youtu.be/Qnoz8Ym_GuQ>

Mukti, Takdir, *Paradiplomacy Kerja Sama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, 2013

Mukti Takdir, *Paradiplomacy Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia* (Yogyakarta : The Phinisi Press Yogyakarta, 2013)

Pact, Milan urban food policy, 'THE MILAN URBAN FOOD POLICY PACT INTERNAL GOVERNANCE', *Fao*, 2021
<<http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wp-content/uploads/2016/06/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-EN.pdf>>

Pemerintah Kota Bandung, 'Aplikasi Arimbi'
<<http://data.bandung.go.id/arimbi/#/kepokmas/pdpasar>> [accessed 26 September 2022]

'Program Bandung Food Smart City', *Bandung Food Smart City*
<<https://bandungfoodsmartcity.org/program/>> [accessed 31 August 2022]

'Smartfood', *Badami Food Sharing* <<https://smartfood.badami.id/>> [accessed 3 September 2022]

'The Milan Pact - Milan Urban Food Policy Pact'
<<https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/the-milan-pact/>> [accessed 28 August 2022]

Urban, Milan, and Food Policy, 'Milan Urban Food Policy Pact Regionalisation Process ACTION PLAN 2021-23', 2021

LAMPIRAN :

1. Mou Kerjasama Kota Bandung Dan MUFPP
2. Surat Keterangan Wawancara

1. Mou Kerjasama Kota Bandung Dan MUFPP



Milan Urban Food Policy Pact 15 October 2015

Acknowledging that cities which host over half the world's population have a strategic role to play in developing sustainable food systems and promoting healthy diets, and because while every city is different, they are all centres of economic, political and cultural innovation, and manage vast public resources, infrastructure, investments and expertise;

Noting current food systems are being challenged to provide permanent and reliable access to adequate, safe, local, diversified, fair, healthy and nutrient rich food for all; and that the task of feeding cities will face multiple constraints posed by inter alia, unbalanced distribution and access, environmental degradation, resource scarcity and climate change, unsustainable production and consumption patterns, and food loss and waste;

Acknowledging that accelerated urbanisation is profoundly impacting our world – in economic, social and environmental dimensions – which therefore necessitates re-examination of the ways in which cities are provisioned with food and water as well as other essential goods and services;

Acknowledging that hunger and malnutrition in its various forms exist within all cities, posing great burdens on individual health and well-being and thus generating major social and economic costs at household, community, municipality and national levels;

Recognizing that family farmers and smallholder food producers, (notably women producers in many countries) play a key role in feeding cities and their territories, by helping to maintain resilient, equitable, culturally appropriate food systems; and that reorienting food systems and value chains for sustainable diets is a means to reconnect consumers with both rural and urban producers;

Acknowledging that urban and peri-urban agriculture offers opportunities to protect and integrate biodiversity into city region landscapes and food systems, thereby contributing to synergies across food and nutrition security, ecosystem services and human well-being;

Acknowledging that since food policies are closely related to many other urban challenges and policies, such as poverty, health and social protection, hygiene and sanitation, land use planning, transport and commerce, energy, education, and disaster preparedness, it is essential to adopt an approach that is comprehensive, interdisciplinary and inter-institutional;



Acknowledging that civil society and the private sector have major roles to play in feeding cities, bringing experience, innovation and campaigns for more sustainable food systems and mainstreaming the critical need for a socially inclusive and a rights-based approach in urban food policy;

Recalling that cities have made commitments to address climate change; to promote strategies and actions for mitigating GHG emissions and adapting cities to the impacts of climate change on urban food systems (for example in successive World Urban Fora and the upcoming Habitat III United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development); and to promote sustainable management of biodiversity through city biodiversity initiatives as part of the Convention on Biological Diversity;

Acknowledging that cities and their neighbouring territories will be active in operationalising international processes such as Sustainable Development Goals (SDGs) and targets in the post-2015 Development Agenda; that they will be involved in the upcoming negotiations for the UN Framework Convention on Climate Change (COP21), as well as contribute to the Zero Hunger Challenge, address sustainable urban diets in the Second International Conference on Nutrition, and play important roles in the post-2015 Framework for Disaster Risk Reduction;

Gathering in Milano on the occasion of the Milan Expo *Feeding the Planet, Energy for Life*,
we hereby state:

BY SIGNING THE MILAN URBAN FOOD POLICY PACT,
WE, THE MAYORS AND REPRESENTATIVES OF LOCAL
GOVERNMENTS, COMMIT TO THE FOLLOWING:

1. We will work to develop sustainable food systems that are inclusive, resilient, safe and diverse, that provide healthy and affordable food to all people in a human rights-based framework, that minimise waste and conserve biodiversity while adapting to and mitigating impacts of climate change;
2. We will encourage interdepartmental and cross-sector coordination at municipal and community levels, working to integrate urban food policy considerations into social, economic and environment policies, programmes and initiatives, such as, inter alia, food supply and distribution, social protection, nutrition, equity, food production, education, food safety and waste reduction;
3. We will seek coherence between municipal food-related policies and programmes and relevant subnational, national, regional and international policies and processes;
4. We will engage all sectors within the food system (including neighbouring authorities, technical and academic organizations, civil society, small scale producers, and the private sector) in the formulation, implementation and assessment of all food-related policies, programmes and initiatives;
5. We will review and amend existing urban policies, plans and regulations in order to encourage the establishment of equitable, resilient and sustainable food systems;
6. We will use the Framework for Action as a starting point for each city to address the development of their own urban food system and we will share developments with participating cities and our national governments and international agencies when appropriate;
7. We will encourage other cities to join our food policy actions.

Bandung, *Agust 6th* 2020

MAYOR OF BANDUNG



[Signature]
H. ODED MOHAMAD DANIAL, S.A.P.



Urban Food Policy Framework for Action

The nature of this Framework for Action is **voluntary**. Its purpose is to provide strategic options to those cities aiming **to achieve more sustainable food systems** by adopting the Milan Urban Food Policy Pact launched by the Municipality of Milan on the occasion of the 2015 Expo “Feeding the Planet, Energy for Life”.

The Framework builds upon the direct experience of participating cities and takes into account relevant diverse commitments, goals and targets. While the options have been organized into thematic clusters, they should be seen as entry points towards achieving the common goal of sustainable food systems. Most interventions (such as school meals or community gardens) may fall under the jurisdiction of more than one municipal agency or department. Most interventions will have an impact on multiple dimensions (economic, social, health and environment) of sustainable development.

Cities can select, adapt and group options into guidelines as necessary to suit their particular situations. Links to related information material and samples of best practices are available as a complementary set of guidance materials.

Recommended actions: ensuring an enabling environment for effective action (governance)

1. **Facilitate collaboration across city agencies and departments** and seek alignment of policies and programmes that impact the food system across multiple sectors and administrative levels, adopting and mainstreaming a rights-based approach; options can include dedication of permanent city staff, review of tasks and procedures and reallocation of resources.
2. **Enhance stakeholder participation** at the city level through political dialogue, and if appropriate, appointment of a food policy advisor and/or development of a multi-stakeholder platform or food council, as well as through education and awareness raising.
3. **Identify, map and evaluate local initiatives** and civil society food movements in order to transform best practices into relevant programmes and policies, with the support of local research or academic institutions.
4. **Develop or revise urban food policies and plans** and ensure allocation of appropriate resources within city administration regarding food-related policies and programmes; review, harmonize and strengthen municipal regulations; build up strategic capacities for a more sustainable, healthy and equitable food system balancing urban and rural interests.



5. **Develop or improve multisectoral information systems** for policy development and accountability by enhancing the availability, quality, quantity, coverage and management and exchange of data related to urban food systems, including both formal data collection and data generated by civil society and other partners.
6. **Develop a disaster risk reduction strategy** to enhance the resilience of urban food systems, including those cities most affected by climate change, protracted crises and chronic food insecurity in urban and rural areas.

Recommended actions: sustainable diets and nutrition

7. **Promote sustainable diets** (healthy, safe, culturally appropriate, environmentally friendly and rights- based) through relevant education, health promotion and communication programmes, with special attention to schools, care centres, markets and the media.
8. **Address non-communicable diseases associated with poor diets and obesity**, giving specific attention where appropriate to reducing intake of sugar, salt, trans fats, meat and dairy products and increasing consumption of fruits and vegetables and non-processed foods.
9. **Develop sustainable dietary guidelines** to inform consumers, city planners (in particular for public food procurement), food service providers, retailers, producers and processors, and promote communication and training campaigns.
10. **Adapt standards and regulations to make sustainable diets and safe drinking water accessible** in public sector facilities such as hospitals, health and childcare facilities, workplaces, universities, schools, food and catering services, municipal offices and prisons, and to the extent possible, in private sector retail and wholesale food distribution and markets.
11. **Explore regulatory and voluntary instruments** to promote sustainable diets involving private and public companies as appropriate, using marketing, publicity and labelling policies; and economic incentives or disincentives; streamline regulations regarding the marketing of food and non-alcoholic beverages to children in accordance with WHO recommendations.
12. **Encourage joint action by health and food sectors** to implement integrated people-centred strategies for healthy lifestyles and social inclusion.
13. **Invest in and commit to achieving universal access to safe drinking water and adequate sanitation** with the participation of civil society and various partnerships, as appropriate.



Recommended actions: social and economic equity

14. **Use cash and food transfers**, and other forms of social protection systems (food banks, community food kitchens, emergency food pantries etc.) to provide vulnerable populations with access to healthy food, while taking into consideration the specific beliefs, culture, traditions, dietary habits and preferences of diverse communities, as a matter of human dignity and to avoid further marginalization.
15. **Reorient school feeding programmes** and other institutional food service to provide food that is healthy, local and regionally sourced, seasonal and sustainably produced.
16. **Promote decent employment for all**, including fair economic relations, fair wages and improved labour conditions within the food and agriculture sector, with the full inclusion of women.
17. **Encourage and support social and solidarity economy activities**, paying special attention to food-related activities that support sustainable livelihoods for marginalized populations at different levels of the food chain and facilitate access to safe and healthy foods in both urban and rural areas.
18. **Promote networks and support grassroots activities** (such as community gardens, community food kitchens, social pantries, etc.) that create social inclusion and provide food to marginalized individuals.
19. **Promote participatory education, training and research** as key elements in strengthening local action to increase social and economic equity, promote rights-based approaches, alleviate poverty and facilitate access to adequate and nutritious foods.

Recommended actions: food production

20. **Promote and strengthen urban and peri-urban food production** and processing based on sustainable approaches and integrate urban and peri-urban agriculture into city resilience plans.
21. **Seek coherence between the city and nearby rural food production**, processing and distribution, focussing on smallholder producers and family farmers, paying particular attention to empowering women and youth.
22. **Apply an ecosystem approach to guide holistic and integrated land use planning and management** in collaboration with both urban and rural authorities and other natural resource managers by combining landscape features, for example with risk-minimizing strategies to enhance opportunities for agroecological production, conservation of biodiversity and farmland, climate change adaptation, tourism, leisure and other ecosystem services.



23. **Protect and enable secure access and tenure to land** for sustainable food production in urban and peri-urban areas, including land for community gardeners and smallholder producers, for example through land banks or community land trusts; provide access to municipal land for local agricultural production and promote integration with land use and city development plans and programmes.
24. **Help provide services to food producers in and around cities**, including technical training and financial assistance (credit, technology, food safety, market access, etc.) to build a multigenerational and economically viable food system with inputs such as compost from food waste, grey water from post-consumer use, and energy from waste etc. while ensuring that these do not compete with human consumption.
25. **Support short food chains**, producer organisations, producer-to-consumer networks and platforms, and other market systems that integrate the social and economic infrastructure of urban food system that links urban and rural areas. This could include civil society-led social and solidarity economy initiatives and alternative market systems.
26. **Improve (waste) water management and reuse** in agriculture and food production through policies and programmes using participatory approaches.

Recommended actions: food supply and distribution

27. **Assess the flows of food to and through cities** to ensure physical access to fresh, affordable foods in low-income or underserved neighbourhoods while addressing sustainable transportation and logistics planning to reduce carbon emissions with alternative fuels or means of transport.
28. **Support improved food storage, processing, transport and distribution** technologies and infrastructure linking peri-urban and near rural areas to ensure seasonal food consumption and reduce food insecurity as well as food and nutrient loss and waste with an emphasis on diversified small and medium scale food businesses along the value chain that may provide decent and stable employment.
29. **Assess, review and/or strengthen food control systems** by implementing local food safety legislation and regulations that (1) ensure that food producers and suppliers throughout the food chain operate responsibly; (2) eliminate barriers to market access for family farmers and smallholder producers; and (3) integrate food safety, health and environmental dimensions.
30. **Review public procurement and trade policy** aimed at facilitating food supply from short chains linking cities to secure a supply of healthy food, while also facilitating job access, fair production conditions and sustainable production for the most vulnerable producers and consumers, thereby using the potential of public procurement to help realize the right to food for all.



31. **Provide policy and programme support for municipal public markets** including farmers markets, informal markets, retail and wholesale markets, restaurants, and other food distributors, recognizing different approaches by cities working with private and public components of market systems.
32. **Improve and expand support for infrastructure** related to market systems that link urban buyers to urban, peri-urban and rural sellers while also building social cohesion and trust, supporting cultural exchange and ensuring sustainable livelihood, especially for women and young entrepreneurs.
33. **Acknowledge the informal sector's contribution** to urban food systems (in terms of food supply, job creation, promotion of local diets and environment management) and provide appropriate support and training in areas such as food safety, sustainable diets, waste prevention and management.

Recommended actions: food waste

34. **Convene food system actors to assess and monitor food loss and waste reduction** at all stages of the city region food supply chain, (including production, processing, packaging, safe food preparation, presentation and handling, re-use and recycling) and ensure holistic planning and design, transparency, accountability and policy integration.
35. **Raise awareness of food loss and waste** through targeted events and campaigns; identify focal points such as educational institutions, community markets, company shops and other solidarity or circular economy initiatives.
36. **Collaborate with the private sector along with research, educational and community-based organisations** to develop and review, as appropriate, municipal policies and regulations (e.g. processes, cosmetic and grading standards, expiration dates, etc.) to prevent waste or safely recover food and packaging using a "food use-not-waste" hierarchy.
37. **Save food by facilitating recovery and redistribution for human consumption of safe and nutritious foods**, if applicable, that are at risk of being lost, discarded or wasted from production, manufacturing, retail, catering, wholee and hospitality.

2. Surat Keterangan Wawancara

**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Wastukencana No.2 Telp. 022 4230097 Bandung

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : PP.09.01/1401-kesbangpol/VIII/2022

Dasar : 1.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
2.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik
3.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
5.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung

Menimbang : Surat Dari Universitas Fajar Nomor : 1320/B/DFEIS-UNIFA/VIII/2022,
Tanggal 15 Agustus 2022, Perihal Penelitian

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

a. Nama : **SULASTRI PRATIWI**
b. Alamat Lengkap : RT. Mangli, RT, 000/000, Desa. Pattan Ulusalu, Kec. Salaputti
Kabupaten Tana Toraja
No. Identitas, Hp : Stambuk. 1810521034, Hp. 089601497292

c. Untuk : 1) Melakukan Penelitian dengan Judul "Implementasi Milan
Urban Food Policy Pact (MUFPP) Dalam Pengembangan
Sistem Pangan Berkelanjutan Di Kota Bandung".
2) Lokasi : Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah
Kota Bandung
3) Anggota Tim : -
4) Bidang Penelitian : -
5) Status Penelitian : Baru
6) Waktu Pelaksanaan : 15 Agustus 2022 s.d 15 Februari 2023

d. Melaporkan hasil Penelitian kepada Wali Kota Bandung c.q Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Bandung, paling lambat 1 minggu setelah selesai.
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Bandung, 15 Agustus 2022
a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
Sekretaris


SONY TEGUH PRASATYA, S.Sos.M.M
NIP. 19680601 199703 1 003